

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN**

DESTINASI PARIWISATA PESISIR PANTAI TOPEJAWA

DI KABUPATEN TAKALAR



Oleh:

MUH. ARFIANSYAH ARIS

Nomor Induk Mahasiswa : 105641100820

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA PESISIR PANTAI TOPEJAWA
DI KABUPATEN TAKALAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan:

MUH. ARFIANSYAH ARIS

Nomor Stambuk: 105641100820

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 029/FSP/A.4-II/VII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jum'at, tanggal 16 bulan Agustus tahun 2024

Mengetahui

Ketua

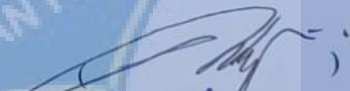



Sekretaris


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 992797

Tim Penguji

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
2. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
4. Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP


()

()

()

()

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Pesisir Pantai Topejawa di Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : MUH ARFIANSYAH ARIS

Nomor Induk Mahasiswa : 105641100820

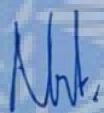
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

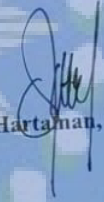


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

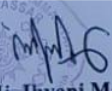

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

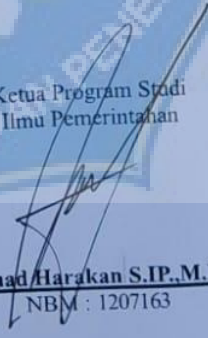

Nursaleli Hartaman, S.IP., M.IP

Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Ahmad Harakan S.IP., M.H.I
NBM : 1207163

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Arfiansyah Aris

Nomor Induk Mahasiswa :105641100820

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar adanya skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Mei 2024

Yang Menyatakan,

Muh. Arfiansyah Aris

ABSTRAK

MUH ARFIANSYAH ARIS (2024). *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir Pantai Topejawa Kabupaten Takalar.

(Dibimbing oleh: Nur Wahid dan Nursaleh Hartaman)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir Pantai Topejawa Kabupaten Takalar. Metode penelitian ini menggunakan tipe fenomenologi untuk menemukan makna dan menggali data jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian berdasar pada teori BALOGH DKK yang melihat kolaborasi pemerintah terbagi menjadi 3 proses yaitu dinamika kolaborasi, dan dampak dan adaptasi pada pada proses kolaborasi. Adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dinamika proses pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa Kabupaten Takalar dalam a) pergerakan prinsip bersama pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak lain namun dalam deliberasi belum berjalan dengan baik karena jarang melakukan diskusi, b) motivasi bersama kepercayaan belum baik karena dalam dimensi kepercayaan bersama pemahaman, c) kapasitas melakukan tindakan bersama dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa Kabupaten Takalar sudah baik dari dimensi prosedur dan kesepakatan bersama namun belum baik dalam dimensi kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. (2) Tindakan-tindakan kolaborasi belum baik dari dimensi memfasilitasi dan memajukan proses kolaborasi karena jarang melakukan sosialisasi dan pelatihan serta komunikasi antara pihak yang bekerjasama tidak terjalin dengan baik. (3) Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi sudah memberikan dampak dilihat dari kesadaran masyarakat mulai tumbuh akan sadar wisata namun belum signifikan dilihat dari kondisi pantai Topejawa belum berkembang dengan baik karena tujuan sapta pesona belum tercapai secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pengembangan, Pariwisata

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tiada kata dan kalimat yang paling indah, selain dari ungkapan syukur kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Pesisir Pantai Topejawa di Kabupaten Takalar” dapat diselesaikan. Sholawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walaupun sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi dengan judul “***Collaborative Governance* dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Pesisir Pantai Topejawa di Kabupaten Takalar**” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa mulai dari awal hingga akhir proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak rintangan, dan cobaan yang selalu menyertainya. Hanya dengan ketekunan dan kerja keraslah sehingga membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga dengan adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak sehingga mempermudah penyelesaian penulis skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Hartati dan Ayahanda Muhammad Aris, dan Kakak-kakak saya Irmansyah Aris dan Irfansyah Aris yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, cinta dan pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Dr. Nurwahid, S.Sos., M.Si dan Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP selaku pembimbing I dan II penulis yang selalu memberikan arahan dan dorongan atas penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Para Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Seluruh informan yang berada pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata Topejawa serta Pemerintah Setempat dan Pengelola Objek Wisata di Topejawa atas kesediaannya memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data dalam rangka merampungkan penelitian.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 14 Juli 2024

Penulis

Muh. Arfiansyah Aris



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL DAN UJIAN AKHIR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori.....	11
C. Kerangka Pikir	24
D. Fokus Penelitian.....	25
E. Deskripsi Fokus Penelitian	26
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28

D.	Informan Penelitian.....	28
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
F.	Teknik Analisa Data.....	30
G.	Pengabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		33
A.	Hasil Penelitian.....	33
1.	Gambaran Umum Desa Topejawa.....	33
2.	Gambaran Umum Dinas Pariwisata.....	34
3.	Gambaran Umum Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).....	42
B.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
1.	Dinamika Kolaborasi.....	49
2.	Tindakan-tindakan Kolaborasi.....	65
3.	Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi.....	70
BAB V PENUTUP.....		74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....		77
LAMPIRAN.....		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan rasa stress dengan menikmati pemandangan yang disuguhkan objek wisata. Undang-Undang No.1 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut spilane (Susilawati 2016) pariwisata merupakan suatu perjalanan dari suatu tempat ketempat yang lain bersifat kontenporer yang di lakukan individu atau kelompok sebagai usaha untuk menemukan suatu kebahagiaan, keseimbangan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Perkembangan tata kelola pada pemerintahan, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaborasi) menjadi fenomena dan (*trend*) yang menarik diteliti Ansell dan Gash (Zaenuri 2016). *Collaborative Governance* merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapatkan sumberdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki oleh para pemegang kepentingan (Sambodo, 2016).

Ansell dkk (Tresiena dkk, 2017) mengkonfirmasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu terdapat partisipasi para pemangku kepentingan, terdapat kondisi dimana ada kesetaraan, kekuasaan, dan terdapat aktor-aktor yang kompeten. Pariwisata memiliki sifat yang kompleks oleh karena itu dalam mengelola pariwisata perlu adanya kerjasama antara swasta, pemerintah maupun masyarakat agar pariwisata dapat berkembang secara baik dan memberikan manfaat bagi manusia. Pembangunan pariwisata mampu menggerakkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Ketika pariwisata direncanakan dengan baik, mestinya akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada sebuah destinasi. Muncul dan berkembangnya kegiatan pada pariwisata tidak lain karena wilayah tersebut terdapat objek yang spesifik dan unik sehingga memiliki daya tarik yang tidak ada di tempat lain sehingga menarik untuk dikunjungi. Sebagaimana diketahui bahwa wisata mempunyai hakekat keunikan, kekhasan, perbedaan, orisinalitas, keanekaragaman, dan kelokalan sehingga menarik banyak orang untuk melakukan perjalanan wisata. Inskeep (zaenuri;2016).

Sulawesi Selatan adalah daerah yang berada di Indonesia Timur menjadi salah satu provinsi yang menawarkan berbagai objek wisata baik itu wisata alam, budaya dan buatan. Banyaknya objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) SulSel pada Agustus 2023 wisatawan mancanegara mencapai 1.566 kunjungan. Jumlah wisatawan mancanegara tersebut sebesar 28,78 jika dibandingkan dengan jumlah

wisatawan mancanegara pada Agustus 2023 yang mencapai 1.216 kunjungan, jumlah wisatawan mancanegara tersebut yang masuk melalui pintu masuk Makassar naik hampir 30% secara bulanan. Ini mengindikasikan bahwa objek wisata yang berada Sulawesi Selatan memiliki daya tarik yang luar biasa untuk menarik perhatian wisatawan mancanegara terhadap kepariwisataan daerah. Salah satunya adalah pariwisata pesisir yang berada di Kabupaten Takalar.

Takalar adalah salah satu daerah tujuan wisata yang tentunya memiliki daya tarik tersendiri untuk wisatawan lokal (Sulawesi Selatan). Jumlah tempat wisata yang menarik di Kabupaten Takalar dan sering dikunjungi oleh wisatawan berjumlah 14 diantaranya; pantai Topejawa, pantai Punaga, pantai Galesong, beach waterboom, taman cinta palekko, bendungan Bissua, PPLH Puntondo, permandian taman wisata Rita, pulau Sanrobengi, Benteng Sanrobone, Pulau Tanakeke, Monumen Lapris, taman Buru Ko'mara, pantai Sampulungang. Adapun jumlah pengunjung pada tahun 2020-2022 berjumlah 924.981 pengunjung. Hal ini didasarkan pada potensi wisata yang dimilikinya. Daerah yang dikenal sebagai tempat yang kaya akan hasil laut dan pertaniannya. Daerah ini memiliki letak geografis yang terdiri dari daerah pulau, pesisir pantai, daratan, dan perbukitan sehingga memiliki kekayaan objek budaya dan objek wisata yang menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan. Salah satu objek yang sangat diminati oleh para wisatawan adalah pantai Topejawa, kawasan ini cukup ramah bagi pengunjung yang ingin bermain-main dengan air laut. Air lautnya cukup tenang , sehingga relatif aman.

Kawasan pantai Topejawa selain bisa menikmati waktu bermain dengan pasir dan air laut, ada beberapa fasilitas yang disediakan di Wisata Pantai Topejawa ini. Diantaranya adalah baruga atau rumah panggung. Baruga ini memang ditujukan agar pengunjung yang kurang suka bermain air dapat menikmati keindahan pantai. Selain itu, juga dapat menyewa perahu untuk berlayar ke tengah laut. Perahu yang disewakan disini adalah perahu tradisional yang disebut dengan Balolang. Lokasi wisata pantai Topejawa Takalar ini berada kurang lebih 14 kilometer dari kota Takalar. Jika dari Makassar berjarak kurang lebih 54 kilometer.

Objek wisata pantai Topejawa sudah dikenal memiliki potensi yang sangat besar. Topejawa menawarkan hal seperti pantainya yang begitu luas dan sangat cocok untuk anak-anak bebas berlarian atau bermain pasir. Berenang di lautnya yang berombak tenang juga bisa menjadi aktivitas menyenangkan. Namun dalam pengelolaannya belum maksimal dan menunjukkan keterbatasan dalam kapasitasnya mengelola pariwisata. Keterbatasan SDM (Pengelola Wisata) yang dimiliki pemerintah menjadi persoalan yang mendasar untuk mengembangkan pantai Topejawa dibutuhkan SDM dan peran kelompok akan sadar wisata (POKDARWIS) yang memadai.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan non-pemerintah dalam melakukan kolaborasi agar pariwisata dikelola dengan baik. Karena dalam *collaborative governance* pemerintah dan non-pemerintah aktif berpartisipasi. Sehingga pariwisata dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa memberikan manfaat.

Berdasarkan paparan di atas menjadi pertimbangan atau alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “***Collaborative Governance dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Pesisir Pantai Topejawa di Kabupaten Takalar***” dalam penulisan proposal ini penulis mencoba menggali informasi mengenai kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, dan masyarakat dalam mengelola pantai Topejawa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas memberikan batas-batasan masalah yaitu, bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir pantai Topejawa di kabupaten Takalar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir pantai Topejawa di kabupaten Takalar.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dari segi teori dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu

1. Secara Teoritis

- a. Dibidang ilmu Manajemen Pemerintahan, dapat menambah wawasan pengelolaan pariwisata.
- b. Menambah wawasan mengenai studi *Collaborative Governance* dalam pengelolaan pariwisata.

2. Secara Praktis

- a. Pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam memberikan kesadaran warga tentang pengelolaan pariwisata yang baik.
- b. Masyarakat, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan pariwisata dan hasil-hasilnya yang telah dicapai, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas kebijakan lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan, penelitian ini melihat beberapa temuan dari penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan topik penelitian tentang “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pesisir pantai Topejawa di Kabupaten Takalar”. Pembahasan yang terkait dengan topik dan pespektif administrasi publik untuk penelitian ini sebagai berikut :



berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan *publish or perish* ditemukan dari 200 artikel jurnal dengan rentan waktu 2003-2024 yang berkaitan dengan kata kunci *COLLABORATIVE GOVERNANCE* ; *DALAM PENGEMBANGAN* ; Kabupaten Takalar, artikel-artikel tersebut dikelola menggunakan *vosviewer* untuk menentukan posisi proyek penelitian. Artikel-

artikel tersebut telah dianalisis dan dimasukkan kedalam aplikasi *vosviewer* guna mengidentifikasi fokus, lokasi, dan objek penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, artikel-artikel tersebut membentuk landasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *COLLABORATIVE GOVERNANCE* ; *DALAM PENGEMBANGAN* ; Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil VOSviewer menunjukkan bahwa gambaran penelitian dimana belum ada penelitian yang menghubungkan antara *Collaborative Governance*, Takalar, dan pariwisata pesisir.

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah, dkk. (2019) Anggito melakukan riset dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Mempromosikan Pariwisata Pendidikan di Kamiri, Masamba, Luwu Utara”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Kolaboratif melibatkan serangkaian langkah, yakni: (1) *face to face* dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan pengelola terlibat dalam diskusi dan berbagai pertemuan seperti forum musyawarah, (2) *Trust building* untuk membangun kepercayaan, pihak pengelola dapat menggunakan metode pelatihan untuk mengembangkan potensi SDM serta menyediakan fasilitas tempat sampah di area wisata, (3) *Commitment to process* dalam mengembangkan pariwisata edukasi, ada keterlibatan baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk bersama-sama berkolaborasi, (4) *share Understanding* untuk memperkirakan sejauh mana kolaborasi yang terjadi dalam perkembangan wisata pendidikan, terdapat platform bagi pengelola, dilakukan pemantauan atau

monitoring wisata yang membantu dalam mempertahankan keamanan wisata edukatif, dan juga dilakukan promosi untuk atraksi wisata.

Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khairurrazyid dan Awang Darumurti (2022). Judul penelitian *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang salah satu proses penelitiannya menghasilkan data deskriptif dari suara atau catatan serta tindakan subjek yang diteliti. Temuan studi menyoroti peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pertumbuhan dan untuk proses kolaborasi diukur dengan 4 indikator seperti komunikasi dan dialog, membangun kepercayaan dan kesepahaman, legitimasi, dan komitmen untuk mengukur proses kerjasama sudah efektif dilaksanakan, namun masih terdapat berbagai hal yang perlu ditingkatkan dan lebih ditingkatkan lagi dalam hal peningkatan dialog dan komunikasi, agar tidak ada lagi kesalahpahaman dengan masyarakat setempat, dan agar pengerjaan KEK Mandalika dapat berlangsung lebih cepat.

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq (2016). Judul penelitian *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar *Stakeholders* Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Teori proses kolaborasi dari Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) digunakan dalam penelitian ini karena mengenali komponen yang menyeluruh dan cocok untuk mengatasi masalah tersebut. Penjelasan komprehensif tentang bagaimana proses kolaboratif bersifat dinamis dan

bersiklus, menciptakan tindakan dan efek sementara sebelum memiliki pengaruh yang signifikan dan memungkinkan rekasi terhadap dampak ini disediakan oleh *Collaborative Governance Regime* (CGR) atau teori proses kolaboratif. Berdasarkan temuan penelitian, proses kerjasama stakeholder dalam pengembangan kawasan Minapolitas di Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi komponen kerjasama Kirk Emerson. Mobilisasi cita-cita bersama, motivasi, dan pembangunan kapasitas adalah langkah pertama dalam proses kolaboratif. Melaksanakan tindakan kooperatif yang memiliki pengaruh sesaat terjadi setelah terciptanya ketiga item tersebut.

Terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya yang disebutkan diatas. Pada penelitian pertama dan kedua, Alamsyah, dkk dan Khairurasyid serta Awang Darumurti memiliki persamaan, yakni membahas *collaborative governance* dalam pengelolaan destinasi wisata dan menggunakan metode penelitian kualitati dan analisisnya secara deksriptif.

Sedangkan persamaan dengan penelitian ketiga, Dimas Luqito Chusuma Arrozaaaq yaitu dalam teori yang digunakan yakni teori proses kolaborasi dari Emerson, Nbatchi dan Balogh (2012). Perbedaan ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengenai lokasi penelitian, teori, dan kontennya sehingga membedakan hasil dari penelitian itu sendiri.

B. Kajian Teori

1. Konsep *Collaborative Governance*

Collaborative (kolaboratif) yang berarti bekerja sama atau *collaboration* yang berarti kerja sama. Dalam pengertian yang lebih luas Frans & Bursuck (Afdal 2015) mendefinisikan kolaboratif sebagai gaya atau cara yang dipilih oleh para profesional untuk pencapaian tujuan bersama. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang terlibat didalam kegiatan kolaboratif memiliki tujuan yang sama, tidak boleh berbeda, sehingga membutuhkan adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut secara bersama sehingga tujuan akan dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Idol & Baran (Afdal 2015) yang menyatakan bahwa *in collaborative, planning and implementing are joint effort*. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan kolaboratif yang efektif kegiatan perencanaan dan merupakan usaha bersama.

Sink (Zaenuri 2016) menjelaskan bahwa kerjasama kolaboratif sebagai proses diaman organisasi-organisasi yang memiliki sebuah kepentingan terhadap masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika dilakukan sendiri-sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat Fosler (Zaenuri 2016) menjelaskan secara lebih spesifik mengenai kerja sama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya usaha secara sadar untuk melakukan *eligment* dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya, aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang tidak sama membangun *shared vision* dan berusaha mewujudkan secara bersama. Dengan adanya visi yang sama maka

setiap komponen memungkinkan untuk berpartisipasi dalam urusan yang disepakati bersama. Dari konsep kolaboratif yang memungkinkan untuk terjadinya kerjasama diantara ketiga pilar *governance* karena sudah diyakin adanya visi bersama maka akan semakin menumbuhkan partisipasi yang tinggi pada sektor non pemerintahan. Masyarakat dan pihak swasta memperoleh ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam manajemen urusan-urusan publik.

Sebagian besar pemerintah telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Akan tetapi kerjasama yang dibangun hanya sebatas konvensional, yaitu sebatas pada kerjasama antara pemerintah sebagai pemilik pekerjaan dan lembaga swasta sebagai kontraktor. Kerjasama ini tidak lebih dari transaksi jual beli barang dan jasa antara pemerintah dan pihak swasta. Kerjasama yang bersifat jangka pendek dengan intensitas hubungan yang terbatas, sebagaimana diatur dalam kontak. Kemanfaatan kerjasama dihitung sebagai kompensasi atau prestasi dan resiko ditanggung masing-masing pihak. Kalau dilihat dari pola kerjasama tersebut kelihatannya sudah ada kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah namun kenyataannya belum ada.

Seharusnya pemerintah lebih memahami kerjasama sebagai kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, masing-masing dari pihak berusaha melakukan inisiasi, penyamaan visi, penyatuan tujuan, strategi dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Meskipun begitu masing-masing pihak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara independen. Hubungan yang dibangun dengan masyarakat bersifat kolaboratif,

hubungan prinsipal agen tidak akan berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal (Dwiyanto, 2010).

Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal adalah prinsipal bertindak sebagai agen untuk mereka sendiri. Kemitraan melibatkan dua pihak untuk saling berbagi sumberdaya, resiko, tanggung jawab dan manfaat. Sifat kerjasama seperti ini membuat kemitraan berorientasi pada kepentingan jangka panjang karena memerlukan daya tahan dan interaksi yang cukup tinggi dari kedua pihak. (Dwiyanto, 2010).

2. Pengertian *Governance*

Pembahasan mengenai *Governance* sudah mengalami perkembangan yang panjang, pendapat Peter dan Piere (1998: 223-224) mengemukakan bahwa *governance* memiliki empat elemen dasar, yaitu: 1) Dominasi jaringan (*the domination of network*), dalam sebuah kebijakan formal, pemerintah di dominasi oleh orang-orang yang memiliki pengaruh, hal ini berkaitan dengan suatu barang dan jasa yang akan diproduksi, 2) Kemampuan dari negara yang semakin menurun untuk melakukan kontrol langsung (*the state's declining capacity for direct control*). Walaupun kini pemerintah tidak lagi melakukan kontrol terpusat akan kebijakan publik, akan tetapi masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhinya. Kini kekuatan negara diartikan dengan kemampuannya dalam bernegosiasi dan berunding dengan aktor yang ada dalam jaringan kebijakan semua anggota yang ada dalam jaringan ini diterima sebagai mitra dalam sebuah proses kebijakan, 3) Menggabungkan sumber daya publik dan swasta (*the blending of public and private resources*). Para aktor publik dan swasta

bekerjasama untuk memperoleh sumber daya yang tidak bisa didapatkan secara mandiri. Seperti, menggunakan suatu perusahaan swasta untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan memungkinkan pemerintah untuk menghindari beberapa masalah prosedural seta akuntabilitas yang mahal dan memakan waktu yang relatif lama. Perusahaan mampu melakukan negosiasi kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang menguntungkan kepentingan publik akan tetapi tidak mungkin dibiayai oleh pihak swasta sendiri, dan 4) Penggunaan beberapa instrumen (*use of multiple instrumen*). Ini merupakan peningkatan keinginan untuk mengembangkan dan menggunakan metode non-tradisional dalam membuat dan menjalankan kebijakan publik. Hal ini juga digunakan melalui instrumen tidak langsung, misalnya menggunakan intensif pajak untuk mengubah sebuah perilaku.

Bevir (Zaenuri 2016) telah mengemukakan *governance* adalah perubahan sistem tata pemerintahan yang meliputi: 1) pergantian dari sistem hirarki dan pasar menjadi sistem jaringan dan kemitraan, 2) melakukan interkoneksi antara administrasi negara dengan masyarakat sipil, 3) pergantian sistem administrasi yang mengandalkan penekanan dan kontrol menjadi pengarah dan koordinasi, 4) pergantian aktivitas pemerintah dari pengaturan dan intruksi menjadi negosiasi dan diplomasi, 5) penyertaan aktor non negara dalam proses kebijakan dan pelayanan publik.

Dari wacana konseptual hingga praktis, konsep *governance* ternyata masih dihadapkan dengan persoalan yang besar dan menjadi tantangan bagi para ahli administrasi publik, masalah yang muncul sehubungan dengan paradigma

manajerial dan demokrasi Bevir (Zaenuri 2016). Dari paradigma manajerial, organisasi dengan banyak aktor-aktir dalam jaringan masih kurang memperlihatkan komando yang jelas misalnya birokrasi yang bersifat hirarkis. Para pembuat kebijakan dan lain-lain telah berusaha untuk mendapatkan cara yang efektif bertindak dalam pengaturan baru. Keikutsertaan aktor non-negara dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan menimbulkan pernyataan apakah hasilnya adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi atau berpihak pada pemerintah atau swasta. Akuntabilitas telah menjadi perhatian oleh lembaga baru dan model partisipasi.

Walaupun masih menimbulkan masalah namun keberadaan teori *governance* kini semakin signifikan dalam pelaksanaan urusan publik. Keikutsertaan aktor non-negara dalam urusan publik dengan tanpa mengedepankan kesejahteraan masyarakat menjadi permasalahan tersendiri. Masalah model partisipasi yang sesuai agar tidak melemahkan kekuatan negara juga perlu penjelasan lebih mendalam lagi. Jaringan yang seharusnya dibangun untuk menghadirkan kerjasama diantara *stakeholder* masih membutuhkan upaya berkelanjutan, demikian juga sebagai akhir dari kolaborasi diantara ketiga pilar *governance* dibutuhkan pola kemitraan yang berorientasi jangka panjang dan memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan.

Sejalan dengan timbulnya pergeseran paradigma dari *government* ke *governance* merupakan cerminan dari *political will* pemerintah untuk menggerakkan reformasi *governance* melalui penerapan prinsip-prinsip *governance* yang baik (*good governance*). Memandang bahwa teori *good*

governance memiliki kerumitan yang tinggi dan kendala yang cukup besar maka dibutuhkan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan praktek *governance*, pengembangan akan lebih mudah dilakukan jika dimulai dari sektor pelayanan publik (Dwiyanto,2005) termasuk di bidang pelayanan pariwisata.

3. Pengertian *Collaborative Governance*

Salah satu perangkat yang penting dalam istilah *collaborative governance* adalah “*governance*”. Sudah banyak penelitian yang telah menghasilkan definisi *governance*, akan tetapi dalam defisi ini hanya sampai pada apa yang dapat di perbuat oleh peemrintah, namun belum secara menyeluruh. Pemerintah secara umum sebagai pembuat aturan, hukum, peradilan dan praktek-praktek administrasi didukung untuk menahan, mengonsep dan memacu penyediaan barang publik. Batasan tersebut memberikan ruang untuk struktur pemerintah tradisional dan hal tersebut membangun pengambilan kebijakan secara publik atau swasta pemerintah mengaruh pada aturan dan membuat arahan pengambilan keputusan bersama (Dewi, 2019:09). Ansell and Gash menjelaskan bahwa strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama (Ansell dan Alison, 2007).

Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan

keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. (Ansell & Gash, 2007). Seperti halnya dikemukakan oleh Gray bahwa kolaborasi merupakan suatu proses berfikir untuk menyelesaikan suatu masalah publik sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, swasta dan lain-lain (Nanang, 2012:49)

Jonathan menjelaskan kolaborasi sebagai jalan diantara orang-orang yang saling berkelanjutan. Dari penjelasan diatas, pada prinsipnya kolaborasi merupakan bentuk interaksi, bekerja bersama, kompromi antara elemen yang saling terkait baik organisasi, pribadi dan pihak-pihak yang bertasipasi dalam kegiatan tersebut, pribadi dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memperoleh akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang memulai sebuah proses kolaborasi merupakan cara yang sama, kesamaan pendapat, kemauan untuk berproses, saling menguntungkan, kejujuran, kasih sayang serta berbasis publik. Konsep kolaborasi dipakai untuk mengilustrasikan hubungan kerja sama yang diperbuat pihak-pihak tertentu. Banyaknya penjelasan yang telah dikemukakan dengan sudut yang tidak sama namun didasari prinsip yang sama yaitu kebersamaan, bekerja bersama, membagi tugas, sama rata, dan akuntabilitas. Namun kolaborasi sangat sulit dideskripsikan dalam hal menggambarkan hakikat dari apa yang ada dalam kegiatan ini (Tresiena, 2017).

Dilain pihak Stoker (Ansell dan Gash 2012) mengemukakan bahwa penjelasan dasar, diambil bahwa *Governance* mengarah pada aturan dan pola yang memandu pengambilan keputusan bersama. Bahwa intinya adalah pada pengambilan keputusan dalam arti bersama. Bahwa intinya adalah pada pengambilan keputusan dalam arti bersama bahwa pemerintah tidak berbicara tentang satu individu yang melahirkan keputusan akan tetapi tentang kelompok individu atau organisasi atau sistem organisais yang melahirkan keputusan.

Kolaborasi berarti bekerja sama atau bekerjasama dengan orang lain. Ini menyiratkan aktor individu, kelompok atau organisasi bekerjasama dalam usaha yang sama. Para aktor bekerjasama dengan yang lain dengan syarat dan ketentuan yang seperti kita ketahui dapat sangat bervariasi. Kata "*collaboration*" pada awalnya digunakan pada abad kesembilan belas ketika perkembangan industrialisasi, organisasi yang lebih kompleks dan pembagian kerja dan tugas meningkat. Ini adalah norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudian manajemen ilmiah dan teori organisasi relasi manusia. Kolaborasi biasanya menarik "putaran" positif. Hal ini sering dilihat sebagai hal yang positif untuk berkolaborasi adalah lebih baik, kreatif, transformasional dan melibatkan hasil yang bermanfaat. Upaya kolaboratif dapat melibatkan pencapaian beberapa hasil atau hasil alternatif, negasi atau pencegahan sesuatu yang terjadi. Kita dapat berkolaborasi untuk tujuan "baik". Terjadinya kolaborasi adalah penting sebagaimana sarana dan praktik yang terlibat, motivasi yang para pelaku, hasil yang diinginkan dan tujuan yang terlibat. (O'Flynn dan Joha, 2008:03)

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan publik dan program-program publik secara cepat (Zaenuri, 2016). Kolaborasi diartikan sebagai kerjasama antara individu, kelompok atau antar instansi dalam rangka mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, sebutan kolaborasi dan kerjasama masih digunakan secara bergantian dan belum terlihat usaha untuk menampilkan perbedaan dan kedalaman makna dalam sebutan tersebut. Secara umum dikenal sebutan kerjasama dibandingkan kolaborasi, dan belum ada pemahaman yang lebih jauh tentang pola yang seharusnya digunakan.

Model *collaborative governance* berdasarkan empat variabel dikemukakan oleh (Ansel dan Gash, 2007) yaitu sebagai berikut: *conditions, institutional design, leadership, and collaborative process*. Kemudian terdapat tiga komponen penting dalam mendorong desain kelembagaan dan kepemimpinan yaitu; *time, task and target*. Dalam kerjasama seperti ini, seluruh pihak-pihak yang melibatkan diri dalam kerjasama tetap memiliki otonominya sendiri. Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri (Dwiyanto, 2010:258).

Strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan sebagai

stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. Sejalan dengan pengertian di atas juga menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik (Irawan, 2016).

Beberapa ahli menggambarkan tahapan dari proses kolaborasi. Pendapat Gray (Emerson dan Nabatchi, 2015:89) memberikan penjelasan mengenai tiga tahapan kolaborasi yaitu masalah pengaturan, penetapan arah serta pelaksanaan. Himmelan (Emerson dan Nabatchi, 2015:89) tahapan kolaborasi dipandang sebagai suatu rangkaian strategi yang berkisar untuk merubah masyarakat melalui “*empowerment collaboration*” atau kolaborasi pemberdayaan.

Balogh, dkk (2012:02) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan 10 dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja. O’Leary Bingham dan Gerard (Balogh, dkk, 2012:02) mendefenisikan bahwa *collaborative governance* merupakan sarana untuk mengendalikan proses yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam sektor swasta, publik dan masyarakat.

Collaborative Governance merupakan usaha serta respon yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi. Dimana dalam penyelesaian masalah publik ini pemerintah seperti pihak swasta, masyarakat dan lain. (Sudarmo dan Mutiarawati, 2017).

4. Proses *Collaborative Governance*

Proses kolaborasi menunjukkan sebuah sistem yang dimana kolaborasi mewakili model yang mendominasi untuk perilaku, pengambilan keputusan dan aktivitas. Dalam proses kolaborasi ini memiliki tiga variabel. Dimana dalam proses kolaborasi yang perlu diperhatikan antara lain yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi serta dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi.

Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi. Pelaksanaan kolaborasi yang baik terdapat pada ketertiban prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama. Tindakan-tindakan kolaborasi merupakan cerminan dari dinamika kolaborasi. Dimana tindakan-tindakan kolaborasi tidak bisa dicapai bila hanya dilakukan oleh satu organisasi saja yang melakukan tindakan. Hasil dari tindakan kolaborasi biasanya dilihat sebagai dampak sementara yang mengarah kembali kepada dinamika kolaborasi. Dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi yaitu dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Karakteristik dampak dalam proses kolaborasi ada yang diharapkan dan tidak diharapkan. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. (Balogh, dkk 2012).

5. Konsep Pengembangan Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Methiesson dan Waill (Nawawi, 2013) pariwisata merupakan pergerakan manusia yang sifatnya hanya sementara ke tujuan-tujuan wisata diluar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-hari dimana aktivitasnya dilakukan selama tinggal di tempat tujuan wisata dan untuk itu disediakan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Baiquni (Nawawi, 2013) pariwisata dimanfaatkan untuk mendorong perubahan hidup melalui peluang kerja yang tersedia, meningkatkan pendapatan dan membaiknya kualitas hidup masyarakat. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor terbesar di dunia sebagai pembangkit ekonomi, namun keberadaan dari pariwisata sangat rentan terhadap bencana baik yang disebabkan oleh perilaku manusia maupun bencana yang disebabkan oleh alam. Menurut Henderson (Zaenuri, 2016) pariwisata merupakan industri yang selalu “dihantui” oleh bencana dan krisis, bahkan bisa dikatakan sangat rentan karena mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan maupun kejadian-kejadian yang ada disekelilingnya.

Pariwisata menurut pendapat dari Krapf dan Hunziker (Susilawati, 2016) adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang diakibatkan perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan orang asing itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang hanya sementara.

b. Tujuan Pengembangan Pariwisata

Tujuan pengembangan pariwisata, bukan hanya sekadar peningkatan perolehan devisa bagi negara, akan tetapi lebih jauh diharapkan pariwisata dapat berperan sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*). Dilihat dari sudut ekonomi, sedikitnya ada delapan keuntungan pengembangan pariwisata di Indonesia: *Pertama*, peningkatan kesempatan berusaha. *Kedua*, kesempatan kerja. *Ketiga*, peningkatan penerimaan pajak. *Keempat*, peningkatan pendapatan nasional. *Kelima*, percepatan proses pemerataan pendapatan. *Keenam*, meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan. *Ketujuh*, memperluas pasar produk dalam negeri. Dan *kedelapan*, memberikan dampak *multiplier effect* dalam perekonomian sebagai akibat pengeluaran wisatawan, para investor, maupun perdagangan luar negeri (Yoeti. A, 2008:XIX).

Dalam pembangunan pariwisata tentunya harus melibatkan pemerintah, semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas serta swasta. Semuanya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata untuk menunjang pembangunan pariwisata. Masyarakat mempunyai dorongan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa harus ikut serta untuk membantu. Mereka akan tertarik untuk ikut serta menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah paham akan mendapat manfaat yang positif. Suwantoro (Nawawi, 2013).

Tata kelola yang baik merupakan tujuan serta cita-cita dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta agar sektor pariwisata dapat semakin maju dan berkembang pesat. Pengembangan suatu objek dan daya tarik wisata,

memang tak lepas dari semua kegiatan yang dapat mendukung berkembangnya kepariwisataan. Menurut Darsoprajinto (Hasanah, 2017).

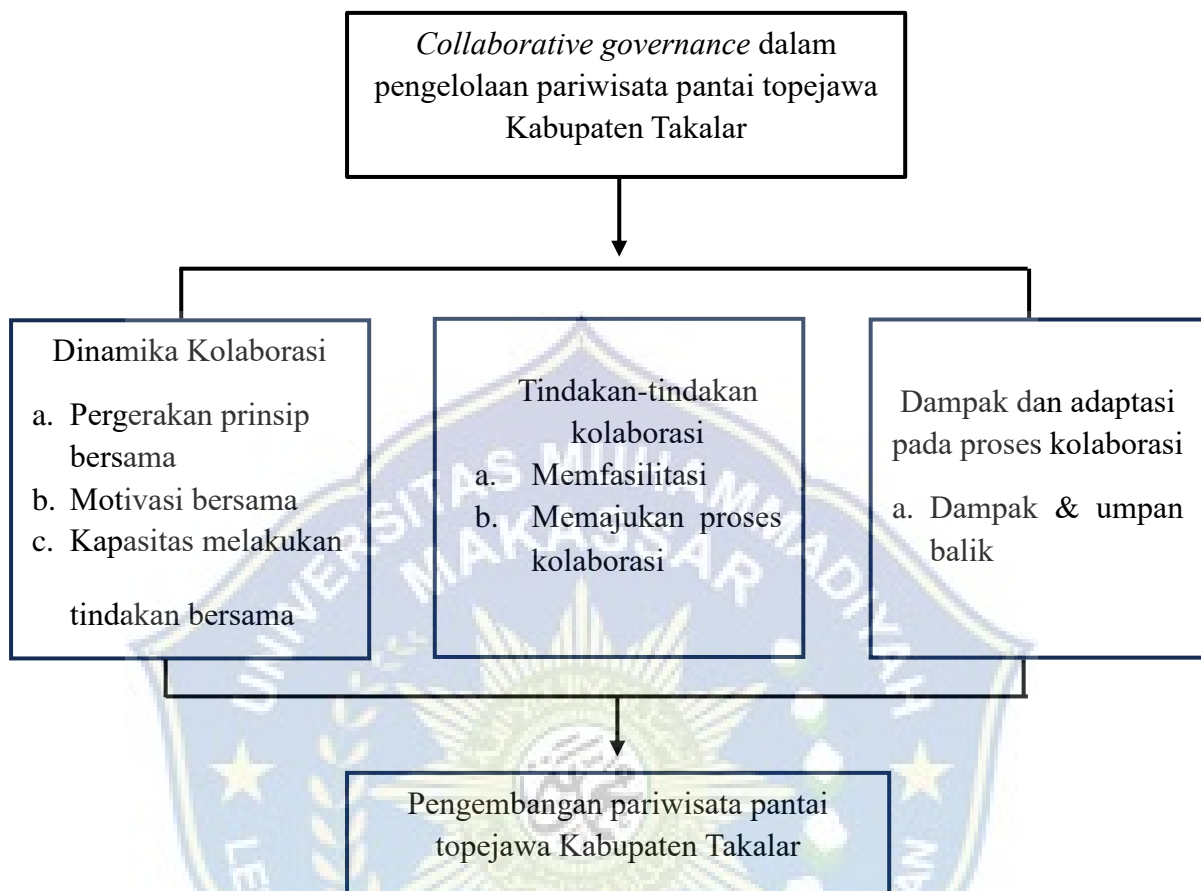
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan perumusan masalah.

Mengacu pada konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintahan maupun non-pemerintah untuk mengelola, menata dan mengatur semua urusan bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien. Dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata pantai Topejawa Kabupaten Takalar. Adapun termasuk dalam pengembangan pariwisata tersebut adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta masyarakat kelompok sadar wisata. Dimana tiga proses dalam *Collaborative Governance* yaitu: a) Dinamika Kolaborasi, b) Tindakan-tindakan kolaborasi, c) Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. (Balogh, dkk. 2012).

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori di atas maka kerangka penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut ini dengan melihat beberapa indikator pada *Collaborative Governance* dalam pariwisata pantai topejawa Kabupaten Takalar.

Bagan Kerangka Pikir



Sumber: (Balogh, dkk. 2012)

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah *collaborative governance* dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir pantai Topejawa di Kabupaten Takalar, dengan tiga indikator yaitu:

1. Dinamika kolaborasi
2. Tindakan-tindakan kolaborasi
3. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian yaitu untuk memberikan pengertian mengenai objek penelitian maka deskripsi fokus pada penelitian ini adalah proses pengembangan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Kabupaten Takalar dengan masyarakat dalam mengelola destinasi pariwisata pesisir yang ada di Kabupaten Takalar, dengan indikator utama yaitu:

1. Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi dan memiliki sifat yang berubah-ubah. Kolaborasi yang baik terdapat dinamika. Didalam dinamika kolaborasi berfokus pada keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir di Kabupaten Takalar.
2. Tindakan-tindakan kolaborasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam proses kolaborasi seperti tindakan memajukan proses kolaborasi dan kegiatan dilapangan untuk membantu dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir di Kabupaten Takalar.
3. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi merupakan dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi dalam proses kolaborasi dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir di Kabupaten Takalar.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan setelah seminar proposal atau setelah surat perizinan telah dikeluarkan oleh pihak fakultas. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Takalar dengan pertimbangan bahwa pengembangan pariwisata di pantai Topejawa yang melibatkan kelompok sadar wisata belum maksimal dan di lokasi tersebut peneliti dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami *collaborative governance* dalam pengembangan destinasi pariwisata. Kebijakan pemerintah daerah tentang pengembangan pariwisata. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data mengizinkan evaluator menggabungkan kegiatan dan kebenaran dari suatu sumber data.

2. Tipe penelitian

Pada tipe dalam penelitian ini adalah fenomenologi yang berfokuskan pada kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata. Tipe penelitian fenomenologi ini digunakan karena penelitian ingin mendapatkan gambaran serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata dalam bentuk *collaborative governance*.

C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil, wawancara *observasi* pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti yaitu: *collaborative governance* dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir di Kabupaten Takalar.
2. Data sekunder adalah data yang didapatkan penulis dari buku-buku, beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan aspek-aspek keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan destinasi pariwisata Kabupaten Takalar khususnya di wilayah pesisir.

D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang, karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti. Informan memiliki nilai-nilai dan motifnya sendiri. Bukan tidak mungkin akan terdapat pertentangan nilai, ataupun pertentangan maksud dan tujuan antara informan dengan peneliti.

Pada penelitian ini, teknik penentuan informasi yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono dalam buku *Memahami Penelitian Kualitatif* (2012:54). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang

kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial diteliti.

Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap peneliti paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti saat ini. Hal ini dikarenakan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang diteliti. Sedangkan informan pendukung, hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang telah peneliti tentukan untuk kemudia dipertimbangkan oleh peneliti, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian ini yaitu orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti. Berikut adalah daftar nama informan, yang akan dimintai informasi oleh peneliti.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah Informan
1.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	4
2.	Pemerintah Desa Setempat	1
4.	Pengelola Objek Wisata	1
5.	Kelompok Sadar Wisata	3

E. Teknik Pengumpulan Data

1. *Observasi*, yaitu pengumpulan data yang didapatkan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan kolaborasi pemerintah Kabupaten Takalar dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir di Kabupaten Takalar.
2. Wawancara, dimana peneliti akan berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan menyusun pedoman wawancara.
3. Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang di ambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang aspek-aspek keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan pantai Topejawa di Kabupaten Takalar.

F. Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Hal-hal yang dilakukan dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi data (data *reduction*), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan memfokuskan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan tranformasi data ksara yang diperoleh.

2. Penyajian data (*data display*), peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display* data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

G. Pengabsahan Data

Sugiyono (2012) data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

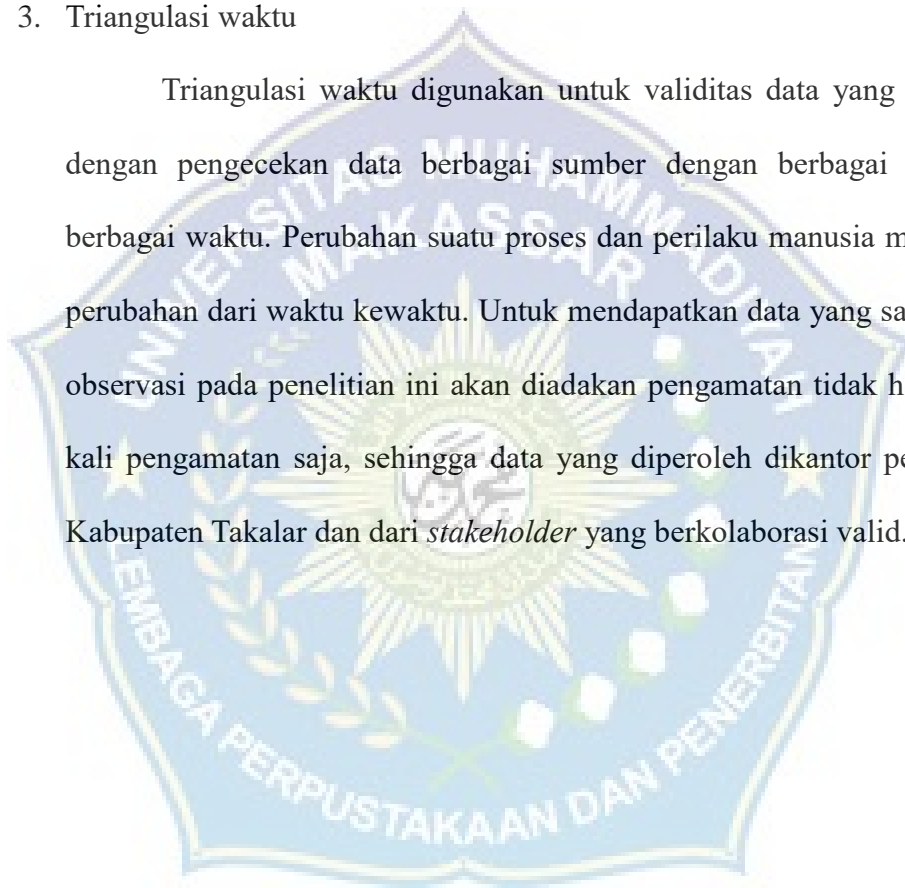
Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada kantor pemerintah dan lokasi objek wisata terkait *Collaborative governance* dalam pengembangan destinasi pariwisata.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh dikantor pemerintah Kabupaten Takalar dan dari *stakeholder* yang berkolaborasi valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Topejawa

Desa Topejawa berada di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar sendiri terletak 5°3'00"-5°3'8" Ls dan 119°02'00" Bt dengan batas-batas wilayah Utara kota Makassar dan Kabupaten Gowa, sebelah timur Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, sebelah selatan laut Flores dan sebelah Barat adalah selat Makassar. Ibu kota Kabupaten Takalar adalah Pattalassang, terletak 29 Km arah selatan kota Makassar. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah 566,51 Km², dimana 240,88 Km² diantaranya adalah daerah pinggir pantai dengan panjang garis pantai sekitar 74 Km².

Jika dilihat kondisi Desa Topejawa sebagai Desa pantai di wilayah Selat Makassar maka wilayah Desa Topejawa yang merupakan dataran dengan ketinggian 1 meter diatas permukaan laut dan secara geologis wilayah memiliki jenis tanah hitam yang berpasir disamping itu wilayah Desa Topejawa memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 28°C, serta memiliki dua tipe musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, musim kemarau berada di bulan mei sampai dengan bulan november dan musim hujan mulai bulan desember sampai dengan bulan april yang berputar setiap tahunnya.

2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata

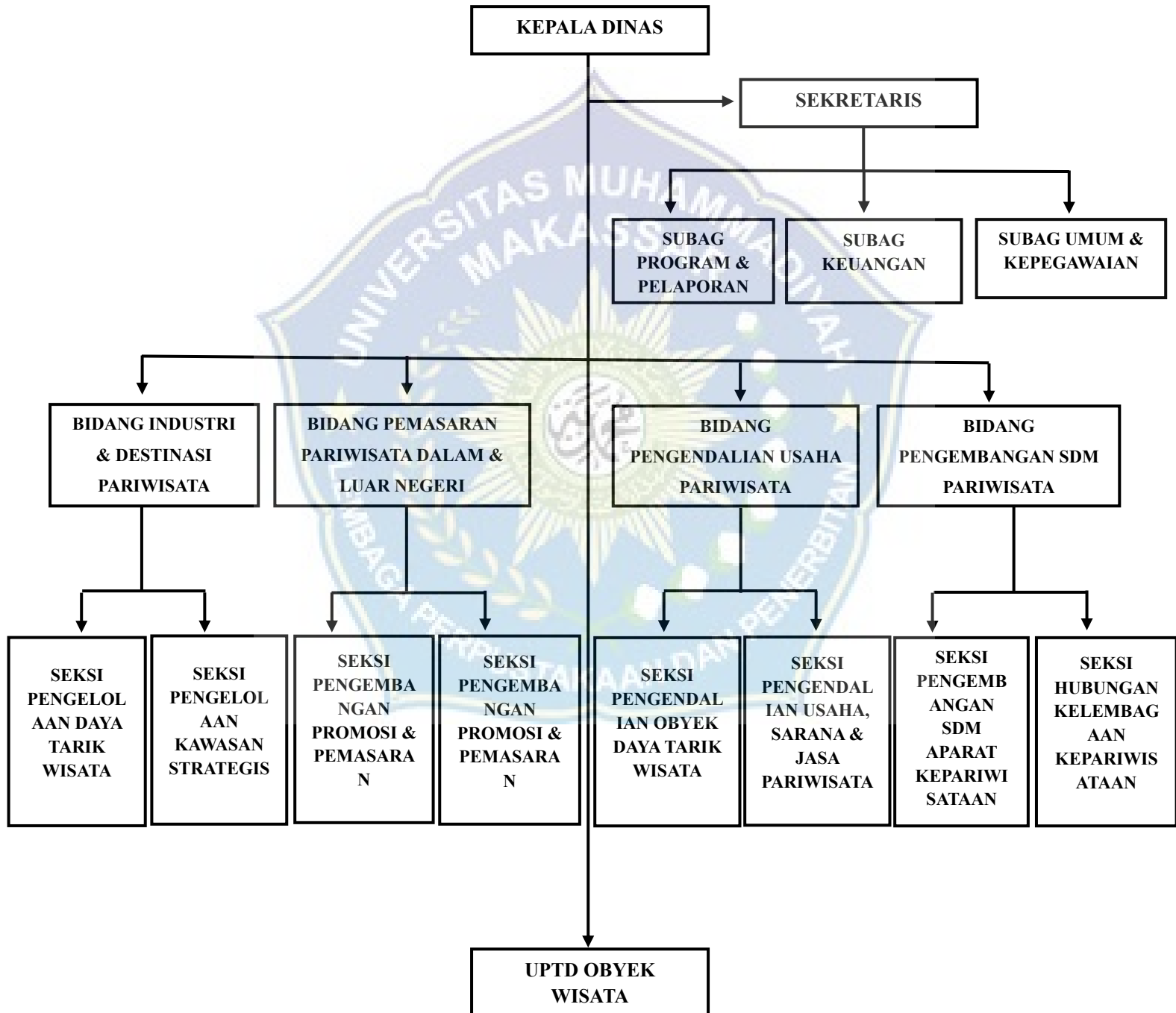
Dinas pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator adalah menyediakan fasilitas di berbagai obyek wisata seperti sarana dan prasarana wisata. Sarana dan prasarana memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan obyek wisata dan dapat menarik para pengunjung untuk mengunjungi obyek wisata.

Peraturan bupati (Perbub) No. 58, BD. 2016/No. 58 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pariwisata Kabupaten Takalar. Bahwa telah ditetapkannya peraturan daerah kabupaten Takalar No. 07 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pariwisata Kabupaten Takalar. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.

a. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA

KABUPATEN TAKALAR



*Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar
(Sumber Dinas Pariwisata)*

b. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata

1) Kepala Dinas

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas utama membantu Bupati dalam mengkoordinasi penyelenggaraan kepariwisataan.
- b) Merumuskan rencana strategi Dinas Pariwisata.
- c) Mengendalikan kepariwisataan didaerah.
- d) Mendistribusikan dan memberikan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.

2) Sekretariat

- a) Sekretariat mempunyai tugas utama membantu Kepala Dinas
- b) Memantau dan melakukan evaluasi tugas dan kegiatan bawahan.
- c) Menyusun hasil laporan pelaksanaan kegiatan.
- d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas utama memabntu sekretariat dalam menyusun program.
- b) Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan dalam melakukan kegiatan.
- c) Melaksanakan pemeliharaan barang/bahan/alat kelengkapan Dinas Pariwisata.
- d) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

4) Sub Bagian Keuangan

- a) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas utama membantu sekretariat menyusun program, petunjuk teknis.
- b) Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan
- c) Menggali sumber pendapatan asli daerah
- d) Menyusun realisasi perhitungan anggaran Dinas Pariwisata
- e) Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

5) Sub Bagian Program

- a) Sub Bagian Program mempunyai tugas utama membantu sekretarian dalam menyusun program dan pelaporasn hasil kegiatan.
- b) Mengumpulkan data dan informasi, tabulasi, pengelolaan.
- c) Menghimpun semua usulan program Dinas Pariwisata.
- d) Menyusun hasil laporan kegiatan.

6) Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata

- a) Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas utama membantu Kepala Dinas menyediakan bahan penyusunan, pemantauan.
- b) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata.
- c) Mengkoordinasi pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data pengembangan pariwisata.

d) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

7) Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata

a) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas utama membantu kepala Bidang menyiapkan penyusunan, pemantauan.

b) Menyusun kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata

c) Melaksanakan sinergitas pengembangan daya tarik wisata dengan kabupaten dan kotamadya serta *stakeholder* pariwisata lainnya.

d) Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

8) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata

a) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas pokok kepala Bidang.

b) Menyusun rencana kegiatan

c) Melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

d) Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata

e) Menyusun laporan hasil kegiatan

9) Bidang Pemasaran Dalam dan Luar Negeri

a) Bidang Pemasaran Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas utama membantu kepala Dinas melakukan penyusunan program kegiatan.

b) Mengkoordinasi penyusunan program kegiatan

c) Mengevaluasi berkala hasil kegiatan

- d) Melakukan pelaporan mengenai hasil kegiatan

10) Seksi Sarana Pengembangan Promosi dan Pemasaran

- a) Seksi Sarana Pengembangan Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang menyiapkan bahan penyusunan kegiatan.
- b) Melaksanakan pengelolaan sarana pengembangan promosi dan pemasaran.
- c) Mengikuti pameran, event promosi pariwisata.
- d) Menyelenggarakan promosi melalui media elektronik dan cetak.
- e) Menyusun hasil laporan kegiatan.

11) Seksi Pengembangan Kerjasama, Event dan Daya Tarik Wisata

- a) Seksi Pengembangan Kerjasama, event dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas utama membantu kepala bidang mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan.
- b) Melakukan pengelolaan pengembangan kerjasama dan pemasaran produksi kesenian kearifan lokal.
- c) Menganalisa pola perjalanan/kunjungan wisatawan.
- d) Melakukan penyusunan hasil kegiatan.

12) Bidang Pengendalian Onyek dan Usaha Pariwisata

- a) Bidang Pengendalian Obyek dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas utama membantu Kepala Dinas menyediakan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi.
- b) Melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pemberian saksi terhadap pelanggar objek dan usaha wisata.

- c) Mengevaluasi data hasil kajian objek wisata dan daya tarik wisata.
- d) Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsi.
- e) Melakukan penyusunan laporan hasil kegiatan

13) Seksi Pengendalian Objek dan Daya Tarik Wisata

- a) Seksi Pengendalian dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas utama membantu kepala bidang menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi.
- b) Melakukan pengendalian lingkungan pada objek pariwisata.
- c) Mengevaluasi dan mengendalikan objek dan daya tarik wisata.
- d) Melakukan penyusunan laporan hasil kegiatan.

14) Seksi Pengendalian Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata

- a) Seksi Pengendalian Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata mempunyai tugas utama membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah.
- b) Melakukan pembinaan serta pengendalian intern terhadap sarana usaha dan jasa pariwisata.
- c) Menyediakan bahan dan melaksanakan proses penetapan kebijakan kendali mutu kegiatan.
- d) Menginventarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata.
- e) Melakukan penyusunan laporan hasil kegiatan.

15) Bidang pengembangan Sumber Daya Pariwisata

- a) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas utama membantu Kepala Dinas mengkoordinasi penyusunan program kegiatan penyelenggaraan kegiatan memantau serta mengevaluasi kegiatan.
- b) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga kepariwisataan untuk pengembangan sumber daya pariwisata.
- c) Menyiapkan bahan penyusunan, penerapan dan pengembangan serta pemantauan evaluasi pelaporan dan kerjasama pelaksanaan kompetensi sumber daya pariwisata.
- d) Melakukan pelaporan hasil kegiatan kepada atasan.

16) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata

- a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas utama membantu Kepala Bidang menyediakan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah.
- b) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dalam rangka penerapan system sadar wisata dan sapta pesona pariwisata untuk mewujudkan sumber daya kepariwisataan yang kompeten dan berdaya saing.
- c) Menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan teknis tenaga kepariwisataan.
- d) Melakukan monitoring koordinasi dan evaluasi pemberdayaan masyarakat pariwisata.
- e) Menyusun laporan hasil kegiatan.

17) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata

- a) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata mempunyai tugas utama membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah.
- b) Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pariwisata dengan pelibatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pariwisata.
- c) Melakukan kerjasama dengan pemerintah desa, lembaga kepariwisataan serta lembaga lainnya guna pengembangan kepariwisataan.
- d) Menyusun laporan hasil berkegiatan.

18) Unit Pelaksana Teknis

- a) Untuk melakukan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas dibentuk UPT.
- b) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas utama melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- c) Jumlah pejabat fungsional disesuaikan dengan kebutuhan.
- d) Jenis dan masa jabatan diatur sesuai dengan ketentuan.

3. Gambaran Umum Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

Kelompok sadar wisata yang selanjutnya disebut sebagai (POKDARWIS) merupakan kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotnya terdiri dari masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap wisata yang berperan untuk menggerakkan dan mendukung terciptanya iklim kondusif serta berkembangnya kepariwisataan dan menciptakan kondisi SAPTA PESONA wisata yang ada di kawasan pantai Topejawa menciptakan keramahtamahan kawan pantai Topejawa

a. **Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata**



*Gambar. 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar
(sumber kelompok sadar wisata)*


b. **Fungsi dan Tugas Pokdarwis**

1) **Fungsi**

- a) Sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah pada destinasi wisata.
- b) Sebagai mitra dari pemerintah dan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata di daerah.

2) **Tugas**

- a) **Devisi Keamanan**
 - 1) Menolong dan melindungi wisatawan
 - 2) Menunjukkan rasa bersahabat terhadap wisata

- 3) Membantu memberi informasi kepada wisatawan
- b) Devisi *Home Stay*
- 1) Memberikan kenyamanan kepada wisatawan
 - 2) Memberikan informasi kepada wisatawan
 - 3) Menampilkan senyum yang tulus
- c) Devisi Kebersihan
- 1) Menjaga kebersihan di lokasi wisata
 - 2) Menjaga lingkungan dari polusi udara
 - 3) Penampilan petugas yang rapi dan bersih
- d) Devisi Keindahan
- 1) Menjaga objek dan daya tarik wisata dalam tatanan yang estetik, dan alami.
 - 2) Menjaga keindahan tanaman hias dan peneduh sebagai estetika keindahan yang mempunyai sifat alami.
- 

1. Keadaan Demografi

a. Struktur Organisasi

Tabel 4.1 Struktur Pemerintahan Pada Tahun 2023

No	Jabatan	Nama	Periode
1.	Kepala Desa	Arman, S.IP	2021- Sekarang
2.	Sekretaris Desa	Nurjayanti, S.Pd	2021- Sekarang
3.	Kasi Pemerintahan	Muhammad Idris, S.Or	2021- Sekarang
4.	Kasi Kesejahteraan	Sudirman	2021- Sekarang
5.	Kasi Pelayanan	Sutrisman Malik	2021- Sekarang
6.	Kaur TU & Umum	Muhammad Irfan	2021- Sekarang
7.	Kaur Keuangan	Iswanto	2021- Sekarang
8.	Kaur Perencanaan	Muhammad, S.Pdi	2021- Sekarang
9.	Kadus Lamangkia	Usman Dg Nuntung	2021- Sekarang
10.	Kadus Topejawa	Ali Muhsin Dg Pasang	2021- Sekarang
11.	Kadus Topejawa Lama	Hamsar	2021- Sekarang
12.	Kadus Kajang	Muhammad Akbar	2021- Sekarang

Sumber: Profil Desa Topejawa Tahun 2023

2. Keadaan Sosial Ekonomi

a. Keadaan Sosial

Berdasarkan data yang di peroleh dan tercatat bahwa jumlah penduduk Desa Topejawa pada tahun 2024 berjumlah 4.017, yang terdiri dari 1.967 jiwa penduduk laki-laki dan 2.050 jiwa penduduk perempuan. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang yakni 51% laki-

laki dan 56% perempuan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tercatat yaitu sebanyak 1.072 KK. Jumlah penduduk Desa Topejawa terbagi menjadi Lima Dusun, yakni Desa Topejawa, Dusun Lamangkia, Dusun Topejawa Lama, dan Dusun Kajang.

b. Tingkat Kesejahteraan

Perbandingan jumlah rumah tangga miskin dan sejahtera di Desa Topejawa yakni untuk jumlah keluarga yang memiliki kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 348 KK, sedangkan untuk kategori sejahtera sebanyak 671 KK.

c. Mata Pencaharian

Secara umum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, penduduk Desa Topejawa mempunyai mata pencaharian yang beragam. Desa Topejawa terdiri dari area pertanian dan persawahan yang masih bersifat tadah hujan karena irigasi masih belum ada di Desa Topejawa. Selain itu Desa Topejawa merupakan Desa yang berada di pesisir pantai sehingga banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, dengan ini mata pencaharian masyarakat Topejawa di dominasi pada petani dan nelayan. Dengan perbandingan untuk petani sebanyak 60% dan untuk nelayan 30%. Untuk pekerjaan lainnya selama ini tercatat 10%. Terdiri dari sektor: PNS, TNI/POLRI, peternakan, jasa, dan pedagang. Untuk lebih jelasnya tersaji mata pencaharian penduduk masyarakat desa Topejawa pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Masyarakat Desa Topejawa

No	Mata Pencaharian	Persentase
1.	Petani	60%
2.	Nelayan	30%
3.	Lainnya	10%

Sumber: Profil Desa Topejawa 2023

3. Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas tentunya memiliki peran dalam penentuan kebutuhan seluruh penduduk. Keadaan di Desa Topejawa mampu menghubungkan antar dusun yang satu dengan dusun lainnya. Kondisi jalan yang sangat baik mampu untuk dilewati roda dua maupun roda empat bahkan transportasi berat sekalipun. Sekitar 13 km panjang jalan yang ada di Desa Topejawa yang menghubungkan 4 dusun, terdiri dari jalan Aspal 3 km, jalan Tanah 1 km, jalan Paving 1 km, jalan Beton 2 km, jalan Tani 3,5 km, dan jalan Sirtu 2,5 km, jarak Topejawa ke Kecamatan Mangarabombang sekitar 5 km dengan kondisi jalan yang sangat baik, dan jarak desa ke kabupaten sekitar 14 km dengan kondisi jalan yang sangat baik.

Terdapat satu kantor desa yang berada di Dusun Kajang, pemilihan tempat tersebut sangat strategis karena berada di tengah antar dusun yang berada di Desa Topejawa. Terdapat pula dua buah posyandu yang berada di Dusun Topejawa dan Dusun Lamangkia dan satu pustu. Terkait sarana sekolah terdapat tiga Sekolah Dasar dan dua Taman Kanak-Kanak. Sedangkan di Desa Topejawa terdapat sarana

ibadah berupa masjid berjumlah tujuh. Untuk lebih jelasnya tersaji sarana prasarana Desa Topejawa pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Sarana/Prasaran Desa Topejawa

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Desa	1
2.	Jalan Kabupaten	14 km
3.	Jalan Kecamatan	5 km
4.	Jalan Desa	13 km
5.	Posyandu	2
6.	Pustu	1
7.	Masjid	7
8.	Sekolah	4

Sumber: Profil Desa Topejawa 2023

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pariwisata akan baik jika dikelola secara bersama oleh karena itu dalam pengembangan pariwisata perlu melibatkan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, lembaga swasta serta dukungan dari masyarakat. Untuk mengelola pariwisata pemerintah menginisiasi sebuah lembaga untuk terlibat dalam mengelola pariwisata dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata inilah yang diidentifikasi sebagai bentuk kolaborasi.

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan pariwisata. Bab ini juga akan menjelaskan dengan memakai tiga proses kolaborasi Balogh dkk. (2012). a.) Dinamika Kolaborasi, b) Tindakan-

tindakan Kolaborasi, c) Dampak dan Adaptasi pada proses kolaborasi. Ketiga proses inilah yang menjadi dasar untuk menganalisis pembahasan pada bab ini dan akan di uraikan sebagai berikut.

1. Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi adalah penggerak penting pada kolaborasi. Dimana dalam melaksanakan proses kolaborasi yang baik terdapat dinamika kolaborasi didalamnya dan didalam kolaborasi terdapat pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama serta kapasitas untuk melakukan tindakan secara bersama.

a. Pergerakan Prinsip Bersama

Pergerakan prinsip bersama dalam sebuah proses kolaborasi adalah hal yang berlangsung secara berkelanjutan atau terus menerus dimana didalam pergerakan prinsip bersama terdapat sebuah tujuan yang sama dengan pihak lain sehingga harus dilakukan secara bersama agar tujuan dapat dicapai.

1) Pengungkapan

Proses kolaborasi terungkap bahwa dalam pengelolaan pariwisata memiliki kepentingan bersama dari pihak dalam melakukan kerjasama serta kepentingan untuk bergabung dalam kolaborasi. Dalam pengembangan pariwisata pantai pesisir pantai Topejawa melibatkan pihak masyarakat dalam hal ini kelompok sadar wisata.

Pengungkapan yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata di pantai Topejawa oleh para informan yang terkait, dilihat dari wawancara dibawah ini, sebagaimana diungkapkan oleh Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagai berikut.

“...dalam pengembangan pariwisata pantai Topejawa di Kabupaten Takalar kami sudah bekerjasama dengan pihak kelompok Sadar Wisata, dan saya rasa memang dalam pengelolaan perlu yang namanya kerjasama dengan tujuan pengembangan dapat mengoptimalkan sumberdaya alam serta meningkatkan daya saing pariwisata daerah, namun kelompok ini kurang aktif secara kelembagaan” (hasil wawancara dengan “R” pada tanggal 25 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam proses pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa sudah cukup bagus karena dalam mencapai sebuah tujuan dalam pengembangan sebuah objek pariwisata telah melibatkan masyarakat dalam hal ini kelompok sadar wisata. Karena dalam pengembangan pariwisata tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja akan tetapi memerlukan keterlibatan dari pihak lain. Senada dengan pernyataan yang telah diungkapkan oleh “R” pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh informan lain. Peneliti pun melakukan wawancara kepada saudara “N” selaku staff Dinas Pariwisata. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan tersebut.

“...dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa kami disini bekerjasama dengan pihak kelompok sadar wisata agar pengembangan bisa maksimal karena jika hanya Dinas Pariwisata saja yang mengembangkan pantai Topejawa saya rasa sulit untuk mengembangkan kawasan pantai Topejawa.” (hasil wawancara dengan “N” pada tanggal 25 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa pihak Dinas Pariwisata, Kelompok Sadar Wisata saling bekerjasama dalam pengembangan pariwisata. Hal yang diungkapkan oleh salah satu informan ini dengan pernyataan dari ketua POKDARWIS. Hasil wawancara sebagai berikut.

“...dalam pengembangan pariwisata di pantai Topejawa pihak dari Dinas Pariwisata bekerjasama dengan kami, dimana kami diikut sertakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinkas Pariwisata.” (hasil wawancara dengan “MD” pada tanggal 26 Juni 2024”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pengungkapan pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa melibatkan pihak lain. Dimana dalam mengembangkan pantai Topejawa pihak dari Dinas Pariwisata melakukan kerjasama dengan pihak kelompok Sadar Wisata karena dalam pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan secara sendiri akan tetapi memerlukan pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pengungkapan pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengembangan pariwisata pesisir di pantai Topejawa sudah cukup baik dalam pengungkapan pengembangan sudah melibatkan elemen lain seperti pihak Dinas Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata. Karena dalam pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja akan tetapi harus melibatkan pihak lain dalam pengembangan pariwisata pesisir di pantai Topejawa hal ini sejalan dengan teori Balogh dkk yang mengatakan proses kolaborasi terungkap bahwa dalam melakukan kerjasama serta kepentingan untuk bergabung dalam kolaborasi. Namun yang menjadi kendala kelompok sadar wisata sudah jarang diikut sertakan karena secara kelembagaan mereka kurang aktif hal ini bisa dilihat dari anggota yang hanya fokus pada usahanya dan tidak lagi menjalankan tugasnya.

2) Deliberasi (diskusi bersama)

Melakukan sebuah kolaborasi harus memiliki landasan utama yaitu diliberasi karena hal ini dapat menunjang dalam proses kegiatan kolaborasi. Diliberasi dalam suatu proses kolaborasi adalah sebuah diskusi bersama dengan aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa Kabupaten Takalar.

Deliberasi yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa oleh pihak yang terkait dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini sebagaimana diungkapkan oleh staff Dinas Pariwisata, dasar dari dilakukannya kolaborasi sebagai berikut.

“...dalam sebuah proses kolaborasi sangat diperlukan yang namanya diskusi bersama dan hal itu memang kami lakukan bersama dengan pihak Kelompok Dinas Pariwisata dikarenakan kita tidak bisa melakukannya sendiri dengan permasalahan yang ada kita memang harus bekerjasama dengan pihak lain.”(hasil wawancara dengan “N” pada tanggal 25 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa salah satu jalan yang ditempuh melalui deliberasi (diskusi bersama) dengan POKDARWIS sehingga dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai deliberasi (diskusi bersama) dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa dapat disimpulkan bahwa salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dengan melakukan dilebari namun dilebari (diskusi bersama) dalam kolaborasi pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa belum berjalan dengan baik

disebabkan langkah yang ditempuh melalui diskusi jarang dilakukan karena Dinas Pariwisata lebih mengutamakan POKDARWIS yang aktif. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Balogh dkk bahwa sebuah kolaborasi harus memiliki landasan utama yaitu dileberasi karena hal ini dapat menunjang dalam proses kegiatan kolaborasi. Proses dileberasi dalam kolaborasi adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam pariwisata yang dilakukan melalui diskusi bersama antara pihak yang berada dalam ruang lingkup pengembangan pariwisata seperti pihak Dinas Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata. Diskusi yang dilakukan kedua belah pihak bertujuan untuk menghasilkan ide serta solusi untuk pengembangan dan penyelesaian masalah yang ada jadi harus selalu dilakukan, karena mengingat hal ini tidak dapat diselesaikan jika hanya melibatkan pihak Dinas Pariwisata saja akan tetapi harus melibatkan pihak lain juga seperti pihak dari Kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan pariwisata di pantai Topejawa.

3) Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan sebuah dorongan atau sebuah kehendak yang dilakukan secara bersama-sama dalam menggapai tujuan tertentu. Dalam melakukan pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa seluruh pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi ini tentu memiliki tujuan yang sama dan hendak dicapai bersama yaitu antara lain:

a) Kepercayaan Bersama

Dalam sebuah kolaborasi kepercayaan bersama sangat penting karena proses pengembangan tidak hanya melibatkan satu pihak saja akan tetapi melibatkan pihak lain sehingga dalam pengembangannya kepercayaan kepada

semua pihak harus ada untuk memperlancar kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa. Kepercayaan bersama sangat dibutuhkan oleh setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk menunjang kelancaran proses kolaborasi yang baik seperti hasil wawancara dengan salah satu informan yakni pengelola objek wisata sebagai berikut:

“...saya kira dalam pengelolaan kepercayaan itu sangat penting karena kita ini melakukan kerjasama, artinya mereka harus tahu bagaimana pengembangan pariwisata itu mulai dari bawah ke atas ataupun dari atas kebawah akan tetapi sekarang kami sudah jarang menyampaikan sesuatu kepada phak dari kelompok sadar wisata karena mereka yang kurang aktif dalam pengembangan ini...” (hasil wawancara dengan “DT” pada tanggal 28 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepercayaan dengan pihak lain sangat penting dalam melakukan kolaborasi karena tanpa adanya kepercayaan antara pihak yang melakukan kolaborasi maka kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan informan pemerintah desa setempat sebagai berikut:

“...iya memang kepercayaan dalam sebuah kerjasama itu harus ada, misal setiap ada kegiatan-kegiatan ada konfirmasi serta penyampaian atau kita bertanya tentang pengembangan pariwisata apa yang baik untuk dilakukan akan tetapi itu dulu sekarang tidak lagi...” (hasil wawancara dengan “A” pada tanggal 28 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kolaborasi pengembangan pariwisata kepercayaan itu penting akan tetapi bila pihak yang melakukan kolaborasi dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata tidak saling mempercayai lagimaka kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kepercayaan bersama dapat diketahui bahwa dalam proses kolaborasi kepercayaan itu sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa. Karena kolaborasi tanpa adanya rasa saling percaya satu sama lain antara pihak yang bekerjasama maka proses kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik. Kepercayaan bersama antara pihak dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa belum baik karena seiring berjalannya waktu kepercayaan antara kedua pihak memudar dikarenakan kurangnya pembagian informasi serta jaranganya diskusi sehingga proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa tidak lagi berjalan dengan baik. Hal ini tidak berbanding lurus dengan teori yang digunakan bahwa dalam sebuah kolaborasi kepercayaan bersama sangat penting karena proses pengelolaan tidak hanya melibatkan satu pihak saja akan tetapi melibatkan pihak lain sehingga dalam pengembangannya kepercayaan kepada semua pihak harus ada untuk memperlancar kolaborasi yang dilakukan.

b) Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama antara semua pihak yang bekerja sama ialah dengan saling mengerti dan menghargai perbedaan dalam melakukan kolaborasi pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa. Pemahaman bersama pada kolaborasi sering dipengaruhi oleh sikap percaya yang telah dibentuk dalam kolaborasi. Hasil wawancara dengan salah satu informan staff Dinas Pariwisata sebagai berikut.

“...membangun pemahaman bersama itu memang dibutuhkan agar kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dulu hal yang kami lakukan untuk membangun pemahaman dengan melakukan komunikasi serta mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan juga menghargai tugas masing-masing. Akan tetapi pihak dari Kelompok Sadar Wisata ini secara kelembagaan kurang aktif lagi sehingga komunikasi kami tidak terjalin lagi dengan baik...” (hasil wawancara dengan “N” pada tanggal 25 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam membangun pemahaman bersama dengan pihak kelompok sadar wisata hal yang dilakukan dengan melakukan komunikasi serta mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan juga menghargai tugas masing-masing akan tetapi hal ini tidak berjalan dengan baik dalam pengelolaan pariwisata pesisir pantai Topejawa karena kelompok sadar wisata di Topejawa tidak aktif dan Dinas Pariwisata lebih mengutamakan kelompok sadar wisata yang aktif. Hasil wawancara dengan salah satu informan Ketua Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

“...kami selalu berupaya untuk membangun pemahaman bersama dengan pihak Dinas Pariwisata dengan saling bekerjasama mengembangkan pantai Topejawa dan saling menghargai tugas masing-masing. Akan tetapi sekarang kami merasa tidak dihargai karena pihak dari Dinas Pariwisata tidak pernah lagi melakukan komunikasi dengan kami sehingga komunikasi kami tidak berjalan dengan baik...”(hasil wawancara dengan “MD” pada tanggal 27 Juni 2024).

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa untuk membangun pemahaman bersama dengan pihak Dinas Pariwisata dengan saling bekerjasama dan menghargai tugas masing-masing akan tetapi komunikasi tidak baik sehingga proses kolaborasi tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman bersama dapat diketahui bahwa dalam berkolaborasi dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa pihak Dinas Pariwisata berupaya membangun pemahaman bersama dengan pihak kelompok sadar wisata untuk menjaga hubungan dengan baik serta kepercayaan antara pihak yang berkolaborasi dengan melakukan komunikasi dan evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan akan tetapi ketidakaktifan dari kelompok sadar wisata membuat komunikasi antar keduanya tidak baik sehingga kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Topejawa tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian hal ini belum sejalan dengan teori dari Balogh dkk yang mengatakan bahwa pemahaman bersama antar semua pihak yang bekerjasama ialah dengan saling mengerti dan menghargai perbedaan.

c) Komitmen

Komitmen dalam sebuah kolaborasi penting dan sangat dibutuhkan karena dalam melakukan tindakan harus memiliki komitmen dengan jelas agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan bersama dapat dicapai. Wawancara yang dilakukan kepada salah satu informan yang terkait bisa dilihat dibawah ini, sebagaimana yang dikatakan kepala Dinas bahwa kerjasama yang dilakukan dengan pihak Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

“...kami dalam melakukan kerjasama dalam pengembangan pariwisata pantai Topejawa komitmen kami berpatokan pada aturan yang telah disepakati yaitu SK kepala Dinas Pariwisata tapi karena kelompok sadar wisata yang ada di Topejawa kurang aktif maka sekarang ini dalam pengembangan mereka tidak terlalu terlibat lagi...” (hasil wawancara dengan “AS” pada tanggal 27 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa komitmen dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa berpatokan pada aturan yaitu SK Kepala Dinas Pariwisata namun karena pihak dari kelompok sadar wisata kurang aktif sehingga kerjasama yang dilakukan tidak berjalan dengan baik lagi. Hal yang sama disampaikan oleh salah satu informan anggota Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

“...selama ini dalam pengembangan pariwisata pantai Topejawa komitmen kami adalah berusaha untuk mempertahankan kerjasama dengan pihak Dinas Pariwisata agar kerjasama ini tidak kendor namun sekarang ini kami sudah sangat jarang dilibatkan dalam pengembangan pariwisata pantai Topejawa sehingga kami tidak dianggap lagi...”(hasil wawancara dengan “W” pada tanggal 27 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai komitmen dapat disimpulkan bahwa komitmen dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa pihak yang melakukan sesuai aturan yaitu SK Kepala Dinas dan berusaha untuk mempertahankan kerjasama agar tidak kendor, namun kedua pihak yang bekerjasama belum menjaga komitmen yang ada dengan kuat sehingga pada kolaborasi dalam pengembangan pariwisata belum berjalan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan teori Balogh karena komitmen dalam sebuah kolaborasi penting dan sangat dibutuhkan komitmen dengan jelas agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan bersama dapat dicapai.

b. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas melakukan tindakan bersama dalam pengembangan pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kerjasama antara pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa.

Setiap pihak memiliki kapasitasnya masing-masing dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama.

1. Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Prosedur dan kesepakatan bersama merupakan salah satu fitur yang penting yang meliputi aturan-aturan serta keputusan yang dibuat melalui kesepakatan bersama. Prosedur dan kesepakatan bersama dalam melakukan kolaborasi pada pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa kepada para informan yang terkait dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan dibawah ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu staff Dinas Pariwisata sebagai berikut:

“...prosedur kami dalam pengembangan pariwisata pantai Topejawa dengan pihak lain mengacu pada aturan SK Kepala Dinas Pariwisata dan dalam pelaksanaannya bagaimana kami dari pihak Dinas Pariwisata mengembangkan pantai Topejawa dengan baik...” (hasil wawancara dengan “N” pada tanggal 25 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam kolaborasi pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa mengacu pada aturan SK Kepala Dinas Pariwisata yang telah ditentukan hasil wawancara ini didukung oleh pernyataan salah satu ketua Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

“...jadi begini de’ kami dalam melakukan kolaborasi dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa prosedurnya itu berdasar pada aturan yaitu SK Kepala Dinas Pariwisata yang telah ditentukan...” (hasil wawancara dengan “MD” pada tanggal 27 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa prosedur dan kesepakatan bersama dalam kolaborasi pengembangan pariwisata pesisir pantai

Topejawa berdasar pada SK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prosedur dan kesepakatan bersama dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa Kabupaten Takalar. Dimana dalam kolaborasi antara pihak Dinas Pariwisata dengan pihak Kelompok Sadar Wisata mengacu pada keputusan yang dibuat oleh Kepala Dinas Pariwisata dalam bentuk SK Kepala Dinas Pariwisata. Hal ini selaras dengan teori yang digunakan dari Balogh dkk bahwa prosedur dan kesepakatan bersama merupakan salah satu fitur yang penting yang meliputi aturan-aturan serta keputusan yang dibuat melalui kesepakatan bersama.

1) Kepemimpinan

Kepemimpinan bisa diartikan sebagai suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka. Kepemimpinan sendiri memiliki peran sebagai pihak yang menggali dukungan untuk melakukan kolaborasi, meditor dan fasilitator dan melakukan advokasi terhadap masyarakat. Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh salah satu informan staff Dinas Pariwisata sebagai berikut:

“...tentu dalam melaksanakan pengembangan pariwisata pantai Topejawa peran kami begitu penting dalam mengarahkan kelompok darwis serta masyarakat karena kami sebagai instansi yang memiliki tugas dalam pengembangan pariwisata dan disamping itu kami membutuhkan dukungan serta kerjasama dari pihak lain untuk melaksanakan pengembangan pariwisata pesisir di pantai Topejawa. Tetapi dukungsn dari masyarakat masih kurang jadi itu yang menjadi persoalan...” (hasil wawancara dengan “N” pada tanggal 25 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepemimpinan begitu penting dalam mengarahkan, sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan pariwisata pesisir pantai Topejawa, serta dalam pengembangan kami juga membutuhkan kerjasama dari pihak lain dalam pengelolaannya namun ketika dukungan dari pihak lain kurang hal itu menjadi persoalan bagi pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa. Hal yang diungkap dari hasil wawancara dari salah satu informan Ketua Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

“...kami selaku pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata pantai Topejawa diberikan tanggungjawab untuk menciptakan SAPTA PESONA di kawasan Topejawa dan juga tugas kami disini bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sadar wisata. Namun hal ini sekarang kami tidak jalankan lagi karena alasan sama seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kelompok ini seakan-akan tidak dianggap lagi jadi kami juga tidak menjalankan tugas dengan baik...” (hasil wawancara dengan “MD” pada tanggal 27 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa kami bertanggung jawab untuk menciptakan SAPTA PESONA guna terciptanya lingkungan yang kondusif dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan dikawasan pantai Topejawa serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar wisata.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kepemimpinan dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan pariwisata masyarakat memiliki peran penting agar pengembangan bisa berjalan dengan baik. Pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa saat ini belum berjalan dengan baik, dimana Dinas Pariwisata sebagai

instansi yang seharusnya berperan dalam mengarahkan dan mengontrol pihak lain belum bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga pihak yang terlibat kelompok sadar wisata dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan belum dijalankan berjalan baik. Hal ini belum sejalan dengan teori yang digunakan dari Balogh dkk bahwa kepemimpinan bisa diartikan sebagai suatu proses mengarahkan dan memengaruhi para anggota dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka.

2) Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dibutuhkan oleh pihak untuk ikut berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Pengetahuan adalah informasi yang telah dipahami oleh aktor, sehingga akan berguna bagi mereka dalam melakukan sebuah kolaborasi dengan banyak pihak. Hasil wawancara dengan salah satu informan staff Dinas Pariwisata sebagai berikut:

“... pada saat kami melakukan kolaborasi ini dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa kami memberikan pelatihan-pelatihan arahan dan informasi yang menyangkut pengembangan, namun untuk sekarang ini hal itu cuma kami lakukan untuk kelompok-kelompok yang aktif saja...” (hasil wawancara dengan “N” pada tanggal 25 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa pemberian arahan dan informasi berupa tugas dan informasi mengenai perkembangan pariwisata hanya dilakukan kepada Kelompok Sadar Wisata yang aktif dilokasinya masing-masing, hal ini diperkuat oleh salah satu informan Kabag Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan sebagai berikut:

“... tentu pengetahuan itu penting untuk kolaborasi untuk pengembangan SDM penggerak kepariwisataan di daerahnya itu kami berikan informasi serta arahan-arahan. Untuk saat ini kami lebih utamakan POKDARWIS yang aktif di daerahnya masing-masing...” (hasil wawancara dengan “MA” pada tanggal 25 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pemberian informasi dan arahan dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa lebih diutamakan untuk Kelompok Sadar Wisata yang aktif. Yang dikatakan oleh salah satu informan Ketua Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

“...awalnya memang dalam kolaborasi pada pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa pada saat ada kegiatan kami diberikan informasi serta arahan-arahan agar pada saat ingin melakukan sesuatu kami sudah punya pengetahuan. Namun sekarang hal itu tidak lagi dilakukan sehingga kami tidak punya informasi mengenai pengelolaan pariwisata jadi kami dikesampingkan...” (hasil wawancara dengan “MD” pada tanggal 27 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan salah satu informan dapat diketahui bahwa kolaborasi dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa pemberian informasi serta arahan kepada pihak yang melakukan kolaborasi masih kurang sehingga proses kolaborasi tidak mengalami kemajuan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas tentang pengetahuan dapat disimpulkan bahwa dalam kolaborasi pengembangan pantai Topejawa pemberian informasi mengenai tugas dan perkembangan pariwisata serta arahan-arahan mengenai apa yang harus dilakukan agar proses kolaborasi bisa berjalan dengan baik belum maksimal dan cenderung mengesampingkan Kelompok Sadar Wisata Topejawa karena dianggap kurang aktif dalam pengembangan pantai Topejawa.

Hal ini belum sejalan dengan teori yang digunakan dari Balogh dkk pengetahuan adalah informasi yang dibutuhkan oleh pihak untuk ikut berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Pengetahuan adalah informasi yang telah dipahami oleh aktor, sehingga akan berguna bagi mereka dalam melakukan sebuah kolaborasi dengan banyak pihak.

3) Sumber Daya

Kolaborasi membutuhkan sumber daya, karena sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh unsur tertentu dalam sebuah kehidupan. Sumber daya bukan hanya yang berwujud secara fisik akan tetapi nonfisik juga dikatakan sebagai sumber daya. Sumber daya yang dimiliki bisa berkembang menjadi semakin besar namun juga bisa hilang, namun ada sumber daya yang abadi dan akan selalu ada. Sumber daya dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dalam wawancara sebagai berikut:

“...dalam melakukan sebuah kolaborasi sumber daya itu sangat dibutuhkan agar pengembangan ini bisa berjalan dengan baik, jadi setiap ada kegiatan tentu kami melakukan pertemuan untuk membahas mengenai pembagian peran dan waktu secara merata agar berjalan dengan semestinya, kalau untuk di Topejawa karena Kelompok Sadar Wisata disana itu kurang aktif jadi kami sudah jarang melibatkan mereka...”(hasil wawancara dengan “HH” pada tanggal 25 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam kolaborasi pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa pihak dari Dinas Pariwisata sudah jarang melibatkan Kelompok Sadar Wisata Topejawa karena kurang aktif berpartisipasi. Hal yang disampaikan oleh Salah satu informan anggota Kelompok Sadar Wisata pada wawancara sebagai berikut:

“...sebenarnya kami selalu bersedia untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan yang dilakukan pihak dari Dinas Pariwisata di pantai Topejawa ketika ada arahan yang diberikan, akan tetapi tidak pernah lagi ada pertemuan dengan kami untuk membahas mengenai pembagian tugas atau pendampingan jadi kami merasa tenaga kami seakan-akan tidak dibutuhkan...” (hasil wawancara dengan “AS” pada tanggal 27 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber daya dari pihak Kelompok Sadar Wisata Topejawa selalu bersedia untuk berpartisipasi pada proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa akan tetapi karena tidak adanya pendampingan serta pertemuan untuk membahas pembagian peran sehingga tidak adanya partisipasi lagi dari pihak Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Topejawa sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai sumber daya kolaborasi dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya dalam pembagian peran dan waktu tidak terbentuk karena dapat dilihat dari fakta bahwa pihak yang bekerjasama tidak pernah lagi melakukan pertemuan untuk membahas hal itu ketika ada kegiatan yang dilakukan. Hal ini belum sesuai dengan teori Balogh dkk karena kolaborasi membutuhkan sumber daya, karena sumberdaya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh unsur tertentu dalam sebuah kehidupan. Sumber daya bukan hanya berwujud secara fisik akan tetapi nonfisik juga dikatakan sebagai sumber daya.

2. Tindakan-tindakan Kolaborasi

Tindakan-tindakan kolaborasi pada prakteknya sangatlah bermacam-macam apapun bentuk yang dilakukan baik dalam wujud kegiatan sosialisasi maupun bimtek yang dilakukan oleh pihak yang berkolaborasi.

a. Memfasilitasi

Memfasilitasi pada proses kolaborasi merupakan cara untuk mempermudah dan melancarkan pelaksanaan kolaborasi. Memfasilitasi adalah sebuah kegiatan yang dapat menjelaskan suatu pemahaman, keputusan serta tindakan yang dilakukan secara individual atau bersama dengan orang lain dengan tujuan mempermudah tugas yang dijalankan. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu informan Kabag Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dalam wawancara sebagai berikut:

“...pihak kami biasa memfasilitasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran wisata, kami juga melakukan bimtek kepada kelompok sadar wisata Takalar. Namun kami akui bahwa hal ini jarang kami lakukan apalagi sekarang kelompok sadar wisata disana kurang aktif...”(hasil wawancara dengan “MA” 25 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa sosialisasi mengenai peran dan kontribusi diberikan kepada masyarakat agar kesadaran mereka terhadap wisata bertumbuh, serta memberikan bimtek kepada POKDARWIS agar anggotanya dapat berkompeten. Namun hal itu jarang dilakukan apalagi sekarang ini Kelompok Sadar Wisata yang ada di Takalar sudah kurang aktif. Hal yang diungkapkan oleh salah satu informan Ketua Kelompok Sadar Wisata pada wawancara berikut ini:

“...begini de’ dalam memfasilitasi minimal kami menyumbang tenaga kalau ada kegiatan, juga mengirim anggota untuk menghadiri pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka yang nantinya mereka memberikan kepada masyarakat...”(hasil wawancara dengan “MD” 27 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam memfasilitasi kolaborasi pengelolaan pariwisata pesisir pantai Topejawa dengan menyumbangkan tenaga serta mengiri anggota untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kemampuan mereka dan nantinya memberikan edukasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai peran dalam memfasilitasi kolaborasi pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa guna memperlancar dan mempermudah proses kolaborasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran dan kontribusi terhadap kepariwisataan serta memberikan bimtek atau pelatihan kepada pihak Kelompok Sadar Wisata untuk meningkatkan kemampuan dalam hal pengembangan pariwisata tetapi hal ini belum maksimal karena jarang dilakukan. Teori dari Balogh dkk belum sepenuhnya berjalan karena memfasilitasi pada proses kolaborasi merupakan cara untuk mempermudah dan melancarkan pelaksanaan kolaborasi. Memfasilitasi adalah sebuah kegiatan yang dapat menjelaskan suatu pemahaman, keputusan serta tindakan yang dilakukan secara individual atau bersama dengan orang lain dengan tujuan mempermudah tugas yang dijalankan sedangkan hal ini belum maksimal karena jarang dilakukan.

b. Memajukan Proses Kolaborasi

Dalam upaya memajukan proses kolaborasi dengan merangkul seluruh pihak yang berperan dalam hal pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa dan bisa menjaga kerjasama yang telah dijalin agar keadaan yang lebih baik dan membangun proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai

Topejawa bisa lebih berkembang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu informan Kabag Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dalam wawancara sebagai berikut:

“...kami berusaha untuk menjalin komunikasi dengan melakukan pertemuan dalam upaya memajukan kolaborasi. Saat ini kami akui belum efektif karena komunikasi kami dengan pihak Kelompok Sadar Wisata tidak berjalan dengan baik dan kami jarang melakukan pertemuan untuk membicarakan masalah pengembangan di kawasan pantai Topejawa...”(hasil wawancara dengan “MA” pada tanggal 25 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya dalam memajukan proses kolaborasi seperti merangkul dan menjaga kerjasama dalam pengembangan pantai Topejawa belum efektif karena komunikasi tidak berjalan dengan baik dan kedua pihak tidak melakukan pertemuan untuk membahas serta bertukar pendapat mengenai pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa. Hal yang sama disampaikan oleh salah satu informan anggota Kelompok Sadar Wisata dalam wawancara berikut ini:

“...upaya kami adalah berusaha terbuka untuk bertukar pendapat ketika ada komunikasi kepada kami dari Dinas Pariwisata. Namun komunikasi kami tidak terjalin dengan baik sehingga upaya yang dilakukan belum efektif untuk memajukan kolaborasi ini...”(hasil wawancara dengan “AS” pada tanggal 27 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam memajukan proses kolaborasi upaya yang dilakukan adalah berusaha terbuka satu sama lain seperti memberitahu rencana yang akan dilakukan dan ingin dicapai namun komunikasi yang tidak terjalin dengan baik sehingga upaya ini belum efektif dalam memajukan proses kolaborasi pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai memajukan proses kolaborasi dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pihak yang bekerjasama untuk memajukan kolaborasi dengan berusaha saling terbuka seperti memberitahu rencana yang akan dilakukan dan ingin dicapai serta mengadakan pertemuan. Namun belum efektif karena komunikasi antara pihak yang bekerjasama tidak terjalin dengan baik dan jarang melakukan pertemuan sehingga upaya untuk memajukan kolaborasi dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa belum efektif. Teori dari Balogh dkk belum sepenuhnya berjalan pada memajukan proses kolaborasi di pantai Topejawa karena dalam teori Balogh dkk dalam upaya memajukan proses kolaborasi dengan merangkul seluruh pihak yang berperan dalam hal pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa dan bisa menjaga kerjasama yang telah dijalin agar keadaan yang lebih baik dan membangun proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata dan hal ini belum terwujud.

c. Bentuk Kolaborasi Pihak Swasta

Wisata pesisir pantai Topejawa berkolaborasi dengan pihak swasta dalam hal ini PT Boddia Jaya. Bentuk kolaborasinya yaitu dengan promosi wisata dan telah mendapat izin resmi dari Dinas Pariwisata juga bekerjasama dengan beberapa pihak seperti POLSEK, dan masyarakat dalam bentuk perdagangan. Hal yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu pemilik wisata sekaligus merupakan direktur utama PT. Boddia Jaya sebagai berikut:

“...kami memang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dalam bentuk promosi wisata agar wisata pantai Topejawa dikenal bukan hanya di SulSel saja, tetapi pantai Topejawa mampu dilihat dan di kenal diseluruh Indonesia. Selain dari promosi wisata kami juga bekerjasama dalam

bentuk peningkatan SDM seperti pelatihan pelayanan, bimtek, sosialisasi dan perizinan resmi dari pemerintah juga melibatkan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban pengunjung...”(hasil wawancara dengan “PL” tanggal 27 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya bentuk kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keterlibatan pemerintah dalam promosi wisata pesisir pantai Topejawa sangat berpengaruh dalam peningkatan pengunjung wisata. Pemerintah juga bekerjasama dalam bentuk peningkatan SDM seperti memberikan pelatihan pelayanan agar pengunjung wisata dapat dilayani dengan baik. Perlu diketahui bahwa tanpa adanya perizinan dari pemerintah, pengembangan destinasi pariwisata pesisir pantai Topejawa tidak berjalan dengan baik. Kepolisian juga dilibatkan menjaga keamanan dan ketertiban agar pengunjung merasa lebih aman.

3. Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi

Dalam proses penelitian yang dilakukan akhirnya akan memberikan dampak. Dari berbagai dampak tentu akan menghasilkan *feedback* atau umpan balik, dan akan diadaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud ialah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari hasil wawancara dengan salah satu informan staff Dinas Pariwisata sebagai berikut:

“...mengelola pariwisata itu sulit ketika kita sendiri yang melakukannya karena pada dasarnya banyak hal yang harus dilakukan dan dengan sumber daya yang kurang maka kita harus melakukan kolaborasi dengan pihak yang lain yang disini adalah kelompok sadar wisata Topejawa dan dampaknya kesadaran masyarakat mulai agak tumbuh. Akan tetapi kolaborasi ini tidak berjalan dengan baik karena pihak pokdarwis yang tidak aktif dalam berpartisipasi sehingga bisa kita lihat dari kondisi pantai Topejawa yang belum berkembang dengan baik...”(hasil wawancara dengan “N” pada tanggal 25 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa sudah memberikan dampak seperti pengetahuan masyarakat akan sadar wisata sudah ada dilihat dari kebiasaan sudah menjaga kebersihan lingkungan area pantai dan bersikap ramah terhadap wisatawan dan menjaga keamanan namun dampak ini bisa dikatakan belum cukup baik karena unsur dari SAPTA PESOMA di Topejawa belum terwujud semua seperti keindahan dan ketertiban tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena keberadaan masyarakat di pinggir pantai membuat keindahan pantai berkurang dan membuat kenyamanan wisatawan berkurang. Hal yang disampaikan oleh informan ketua Kelompok Sadar Wisata dalam wawancara berikut ini:

“...pengembangan pariwisata pantai Topejawa yang tidak dapat dilakukan secara sendiri, makanya kami melibatkan diri dengan melakukan kolaborasi dengan pihak Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata ini. Namun kolaborasi ini kami rasa belum memberikan dampak yang signifikan bagi wisata pantai Topejawa dan seakan-akan pihak dari Dinas Pariwisata jalan masing-masing dan tidak mengangap keberadaan kami lagi...”(hasil wawancara dengan “MD” pada tanggal 27 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi yang dilakukan pada pengembangan pariwisata pantai Topejawa memberikan dampak yaitu mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai sadar wisata dan membuka peluang lapangan kerja dan peluang pendapatan bagi masyarakat. Namun dampak dari kolaborasi dalam signifikan karena kondisi Topejawa yang belum berkembang dengan baik dilihat dari SAPTA PESONA di kawasan Topejawa belum tercapai secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai dampak dan diadaptasi pada proses kolaborasi pantai Topejawa Kabupaten Takalar sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh akan kepariwisataan serta membuka peluang pendapatan kepada masyarakat namun hal ini belum signifikan karena kondisi pantai Topejawa yang belum berkembang dengan baik dilihat dari SAPTA PESONA dikawasan pantai Topejawa belum tercapai secara keseluruhan dan pihak Dinas Pariwisata seakan-akan jalan sendiri dalam melakukan pengembangan dan mengesampingkan kelompok sadar wisata dari berbagai dampak yang dihasilkan dari proses kolaborasi ini tanggapan kedua pihak yang bekerjasama mengenai dampak yang dihasilkan sudah cukup baik walaupun masih ada tujuan yang belum dicapai. Hal ini ketika dikaitkan dengan teori dari Balogh dkk yang digunakan menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi dalam pengembangan pantai Topejawa sudah memberikan dampak yang kemudian menghasilkan umpan yang nantinya akan diadaptasi oleh kolaborasi.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian di atas dapat diketahui tugas dari masing-masing pihak dalam pengembangan pariwisata pantai Topejawa Kabupaten Takalar.

No	Lembaga	Tugas	Implementasi	Keteranagn
1.	Dinas Pariwisata	1. Penyediaan sarana dan prasarana	Terimplementasi namun belum maksimal	1. Pengadaan gazebo 2. Pembangunan homestay Green Topejawa Coastal

		<p>2. Sosialisasi mengenai sadar wisata</p> <p>3. Pemberian bimtek kepada anggota POKDARWIS</p>	<p>Terimplementasi namun jarang dilakukan</p> <p>Tidak terimplementasi</p>	<p>Pemberian sosialisasi kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran mengenai wisata</p> <p>Dinasi pariwisata lebih memprioritaskan kelompok aktif</p>
2.	POKDARWIS	<p>1. Mengurusi Kebersihan</p> <p>2. Mengurusi masalah keindahan</p> <p>3. Mengurusi masalah keamanan dan ketertiban</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>terimplementasi</p> <p>terimplementasi</p>	<p>Kondisi pantai Topejawa cukup bersih dan sering ada aksi bersih-bersih</p> <p>Kondisi kawasan pantai Topejawa sudah cukup indah</p> <p>Kondisi kawasan wisata yang aman</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya bahwa fokus peneliti pada kolaborasi pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa Kabupaten Takalar maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika dalam kolaborasi pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa Kabupaten Takalar masih kurang terlaksanakan dengan baik walaupun dalam pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak kelompok sadar wisata namun kelompok ini secara kelembagaan tidak terlalu aktif, serta komunikasi belum berjalan dengan baik juga kurangnya kepercayaan antara kedua pihak dan komitmen mereka belum kuat walaupun dalam berkolaborasi sudah mengacu pada SK Kepala Dinas Pariwisata.
2. Tindakan-tindakan kolaborasi dalam pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa Kabupaten Takalar dalam memfasilitasi kolaborasi belum maksimal karena jarang ada pelatihan dan sosialisasi yang berkolaborasi, dan untuk memajukan proses kolaborasi pihak yang bekerjasama jarang melakukan pertemuan.
3. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi pengembangan pariwisata pesisir pantai Topejawa Kabupaten Takalar sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh akan kepariwisataan serta membuka peluang pendapatan kepada masyarakat namun hal ini

belum signifikan karena kondisi pantai Topejawa yang belum berkembang dengan baik dilihat dari SAPTA PESONA dikawasan pantai Topejawa belum tercapai secara keseluruhan, walaupun demikian tanggapan kedua pihak, yang bekerjasama mengenai dampak yang dihasilkan sudah cukup baik meski masih ada tujuan yang belum dicapai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang *Collaborative Governance* dalam pengembangan pariwisata pantai Topejawa Kabupaten Takalar, oleh karena itu peneliti menyarankan:

1. Dinas Pariwisata dan POKDARWIS harus lebih berperan aktif serta selalu ada regenerasi di pihak POKDARWIS agar lebih aktif lagi berkolaborasi dalam melakukan pengembangan untuk mengembangkan pariwisata Topejawa.
2. Dinas Pariwisata dan POKDARWIS harus membangun komunikasi dan melakukan pertemuan. Serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada dikawasan wisata untuk memberikan pemahaman tentang sadar wisata.
3. Dinas Pariwisata dan POKDARWIS harus lebih meningkatkan lagi proses kolaborasi yang dilakukan agar dapat mengembangkan Topejawa menjadi lebih baik.
4. Masyarakat harus lebih dilibatkan berpartisipasi dalam kolaborasi pengembangan destinasi pariwisata pesisir pantai Topejawa.

5. Pemerintah daerah Kabupaten Takalar harus lebih fokus memperhatikan akses ke lokasi wisata pantai Topejawa agar pengunjung lebih puas dalam perjalanan menuju wisata Topejawa.



DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. dan Alinson G. 2007. *Collaborative governance In Theory And Practive. Journal Of Public Administration*. University of California berkeley.
- Ansell, C. dan Alinson, G. 2012. *Stewards, Mediator, and Catalyst: Tower a Model Of Collaborative Leadership 1, The Inovation Journal*. Vol. 17 No. 1
- Afdal, 2015. Kolaboratif: Kerangka Kerja Masa Depan, Jurnal Konseling dan Pendidikan. Vol. 3 No. 2
- Ali, Muhammad Fadhly., 2018. Jumlah Wisman ke Sulsel naik hampir 30 persen. Makassar 3 September 2018 ([http://,makassar.tribunnews.com/2-18/09/03/jumlah-wisman-ke-sulsel-naik-hampir-30-persen](http://makassar.tribunnews.com/2-18/09/03/jumlah-wisman-ke-sulsel-naik-hampir-30-persen))
- Balogh, dkk. 2012. *An Intertive Framework for Collaborative Governance. Journal Of Public Administration Research and Theory*
- Dwiyanto, Agus. 2010. *manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dewi, R. T. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* dalam pengembangan industri kecil (studi kasus tentang kerajinan reyog dan pertunjukkan reyog di kabupaten ponorogo) Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Dewi, R. T. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* dalam pengembangan industri kecil (studi kasus tentang kerajinan reyog dan pertunjukan reyog di Kabupaten Ponorogi) Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Emerson, kirk, Nabatchi, Tina. 2015. *Collaborative Governance Regimes*, Georgetwon University Press

- Hasanah Mauizatul. 2017, *Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat (Kasus Objek Alam Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan)* Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar
- Haryono, Nanang. 2012. *Jejaring Untuk Mengembangkan Kolaborasi Sektor Publik*. Jurnal Jejaring Administrasi Publik. Th. IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012.
- Nurhas Irwan, Pawlowski JM, Jansen M, Stoffregen J. 2016 *OERauthors: Requirements For Collaboration OER Authoring Tools In Global Settings. European Conference On Technology Enhanced Learning*, 460-465
- Nawawi, Ahmad, 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di Desa Kretek Parangkritis*, jurnal nasional pariwisata. Vol. 5 No. 2
- O'Flynn and John Wanna. 2008. *Collaborative Governance : A New Era Of Public Policy In Australia*. Australia : E Press
- Peters, G. Guy and John Pierre, 1998 "Governance whitout Government, Rethinking Publick Administration", *Journal of Public Administration Research and Theory* 8: 223-244
- Susilawati 2016. "strategi pengembangan pariwisata pantai bira sebagai sumber unggulan pendapatan asli didaerah kabupaten bulukumba" *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 2 No. 3
- Sudarmo dan Tika Mutiarawati. 2017. *Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan*. Jurnal Wacana Publik. Vol. 1 No. 2
- Sambodo Giat Tri. 2016. "Pelaksanaan *Collaborative Governance* di desa budaya brodot, galur, kulonprogo, DIY", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Vol.3 No.1

Sugiyono, 2012. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Bandung

Tresiena Novita, Duadji Noverman, 2017. Jurnal Seminar Nasional FISIP Unila
Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan (*Collaborative
Management Of The Teluk Kiluan Tourism*).

Zaenuri, Muhammad. 2016. Tata kelola pariwisata-bencana dalam perspektif
collaborative governance (studi kasus pariwisata-bencana lava tour merapi
Kabupaten Selemen).



LAMPIRAN











**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN MANGARABOMBANG
DESA TOPEJAWA**

Alamat: Jl. PorosTopejawaCikoang.e-Mail: topejawadesa@gmail.com Pos:92261

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : ~~26~~ / DTP / VI / 2024

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 27608/S.01/PTSP/2023, Tanggal 14 Juni 2024 perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor : 070/380/BKBP/X/2023 tanggal 14 Juni 2024 dan Surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 372/IP-DPMPTSP/X/2023, tanggal 14 Juni 2024 perihal izin penelitian, maka kami selaku Kepala Desa Topejawa memberikan kekeluasaan dan izin penelitian kepada saudara :

Nama	: MUI, ARFIANSYAH ARIS
Tempat Tanggal Lahir	: Bontomanai, 02-07-2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan/Tembaga	: Mahasiswa (S1) Unismuh Makassar
Alamat	: Dusun Bontomanai Desa Bontomanai Kec. Mangarabombang Kab. Takalar
Judul Penelitian	: Collaborative governance dalam pengembangan destinasi Parawisata pesisir pantai Topejawa Kabupaten Takalar
Tanggal Pelaksanaan	: 14 Juni s.d. 14 Juli 2024

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Topejawa, 14 Juni 2024
Kepala Desa Topejawa



[Signature]
SE TRISMAN MALIK



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 15527/S.01/PTSP/2024
 Lampiran : -
 Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Takalar

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4484/05/C.4-VIII/VI/1445/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUH.ARFIANSYAH ARIS
 Nomor Pokok : 105641100820
 Program Studi : Ilmu pemerintahan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PESISIR PANTAI TOPEJAWA DI KABUPATEN TAKALAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 14 Juni s/d 14 Juli 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 14 Juni 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Pertinggal.

No. SERI 232


PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Syech Yusuf Kab. Takalar
 Email: dpmpstakalar@gmail.com website: www.dpmpstakalar.kab.go.id

Takalar, 20 Juni 2024

Nomor : 232/IP-DPMPSTSP/VI/2024
 Lamp. : -
 Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
 Yth. 1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar
 2. Kepala Desa Topejawa
 Di
 Takalar

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul-Sel, Nomor: 15527/S.01/PTSP/2024, tanggal 14 Juni 2024, perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor: 070/240/BKBP/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : MUH. ARFIANSYAH ARIS
 Tempat Tanggal Lahir : Bontomanai, 02 Juli 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar
 Alamat : Bontomanai Desa/ Kcl. Bontomanai
 Kec. Mangarabombang Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :


“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PESISIR PANTAI TOPEJAWA DI KABUPATEN TAKALAR “.

Yang akan dilaksanakan : 14 Juni s/d 14 Juli 2024
 Pengikut / Peserta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.


IBRAHIM, SE., M.M
 Kepala Dinas
 Pembina Utama Muda
 NIP : 197202242000032002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
5. Pertinggal;



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jenderal Sudirman No. 26 Kabupaten Takalar

SURAT KETERANGAN

Nomor: 225 / Disparpora / VII / 2024

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HADRIANI HANAFIE, S. Sos., M. Si
Pangkat / Golongan : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 197611282007012012
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Alamat Instansi : Jl. Jenderal Sudirman No. 26 Kabupaten Takalar

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa:

Nama : MUH. ARFIANSYAH ARIS
Nim : 105641100820
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Benar telah melakukan Penelitian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar terhitung mulai periode 14 Juni s/d 14 Juli 2024 dengan tujuan Penelitian dalam rangka penyusunan Proyek Akhir dengan judul **COLLABORATIVE GOVERNANCE Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Pesisir Pantai Topejawa Di Kabupaten Takalar**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 4 Juli 2024

Kepala Dinas,



HADRIANI HANAFIE, S. Sos., M. Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 197611282007012012